

KRITIK KONSEP NKRI BERSYARIAH HABIB RIZIEQ
PERSPEKTIF TEORI DEKONSTRUKSI HERMENEUTIKA
JACQUES DERRIDA

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh:

FAHMI ACHMAD BISONO

NIM: E01217007

PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahmi Achmad Bisono

NIM : E01217007

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sidoarjo, 18 Desember 2021

Saya yang Menyatakan

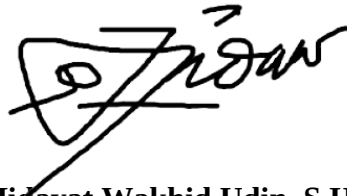


Fahmi Achmad Bisono
E01217007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul “Kritik Konsep NKRI Bersyariah Habib Rizieq Perspektif
Teori Dekonstruksi Hermeneutika Jacques Derrida” yang ditulis oleh Fahmi
Achmad Bisono ini telah disetujui pada 05 Januari 2022

Surabaya, 05 Januari 2022
Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nur Hidayat Wakhid Udin', with a stylized, cursive script.

Nur Hidayat Wakhid Udin, S.HI, M.A
NIP: 198011262011011004

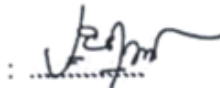
PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “Kritik Konsep NKRI Bersyariah Habib Rizieq Perspektif Teori Dekonstruksi Hermeneutika Jacques Derrida” yang ditulis oleh Fahmi Achmad Bisono ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 12 Januari 2022

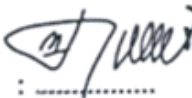
Tim Penguji:

1. Nur Hidayat Wakhid Udin, S.HI, M.A.
2. Dr. Loekisno Choiril Warsito, M.Ag.
3. Fikri Mahzumi, M.Fil.I.
4. Dr. Mukhammad Zamzami, Lc., M.Fil.I.


:


:


:


:



Surabaya, 22 Januari 2022
Dekan,


Prof. Dr. H. Kunawi, M.Ag.

PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fahmi Achmad Bisono
NIM : E01217007
Fakultas/Jurusan : FUF/AFI
E-mail address : fahmiachmadb3@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Kritik Konsep NKRI Bersyariah Habib Rizieq Perspektif Teori Dekonstruksi Hermeneutika

Jacques Derrida

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Februari 2022

Penulis

(Fahmi Achmad Bisono)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Judul : Kritik Konsep NKRI Bersyariah Habib Rizieq Perspektif Teori Dekonstruksi Hermeneutika Jacques Derrida

Nama : Fahmi Achmad Bisono

Pembimbing : Nur Hidayat Wakhid Udin, S.HI, M.A.

Penelitian ini membahas terkait konsep NKRI Bersyariah yang digagas oleh Habib Rizieq Syihab. Menurutnya dengan menerapkan syariah secara menyeluruh dapat mengatasi berbagai macam problematika yang sedang melanda Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif disertai alat analisis dari teori hermeneutika Jacques Derrida sebagai pendekatannya. Sementara itu, hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terdapat beberapa kerancuan dalam logika berpikir yang terdapat pada konsep NKRI Bersyariah tersebut, yakni antara tanda “syariah” yang memiliki makna suatu aturan yang ketat dan mengekang dengan tanda “toleransi” yang memiliki makna suatu kebebasan sehingga masih harus memerlukan kajian lebih lanjut terhadap implementasinya.

Kata Kunci: *Hermeneutika Derrida, Habib Rizieq, NKRI Bersyariah*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

COVER

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	.iv
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang	1
B Rumusan Masalah	7
C Tujuan	7
D Kegunaan Penelitian.....	7
E Kajian Terdahulu.....	8
F Metodologi Penelitian	12
G Sistematika Pembahasan	13

BAB II KONSEP DEKONSTRUKSI JACQUES DERRIDA	15
A Faktor Penyebab Dekonstruksi	15
B Dekonstruksi Jacques Derrida.....	20
BAB III KONSEP NKRI BERSYARIAH HABIB RIZIEQ	31
A Potret Keberagaman di Indonesia	31
B Selayang Pandang Habib Rizieq Shihab	35
C Konsep NKRI Bersyariah	39
BAB IV KONSEP INDONESIA BERSYARIAH DALAM ANALISIS DEKONSTRUKSI JACQUES DERRIDA	47
A Oposisi Biner dalam Konsep NKRI Bersyariah.....	47
B Differance dalam Konsep NKRI Bersyariah.....	52
C Diseminasi.....	58
BAB V PENUTUP.....	63
A Kesimpulan	63
B Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki beragam kebudayaan mulai dari beragam agama, suku, budaya, ras, hingga bahasa.¹ Meskipun sangat beragam Indonesia terkenal tetap bisa menjaga satu kesatuan dari kesemuanya itu, hal ini bisa dilihat dari salah satu simbol persatuan negara ini yaitu Bhineka Tunggal Ika. Bahkan, Indonesia juga memiliki hubungan baik dengan negara-negara lain karena beberapa faktor salah satunya adalah keberhasilan Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia ini dengan tegas secara hukum, dan bijaksana, serta rendah hati.

Indonesia kaya akan keanekaragaman sejak zaman nenek moyang kita dahulu dengan beberapa sistem peraturan baik politik, ekonomi, kebudayaan, dan sistem tatanan kehidupan sosial lainnya. Keanekaragaman dan keberagaman ini patut untuk tetap dijaga, bahkan jelas disampaikan dalam sebuah pilar Pancasila bahwa keberlangsungan multi etnis dan kepercayaan merupakan sebuah amanah yang harus dijaga dan dilestarikan dengan baik.²

¹ <http://ditsmp.kemdikbud.go.id/indahnya-keberagaman-dan-pentingnya-toleransi-di-Indonesia/>, Diakses pada 29 Juni 2021 pukul 10.23.

²H. Hastangka, dkk., “Empat Pilar MPR RI: Politik Bahasa Dan Delegitimasi Makna Pancasila (Suatu Telaah Filsafat Bahasa)”, *CIVIS* 6, No. 2 (2017), 10.

Kesatuan dan persaudaraan saat ini harus dimaknai secara benar. Hal ini mengingat banyaknya narasi-narasi anti keberagaman yang bertebaran di dunia digital. Misalnya narasi Habib Rizieq tentang NKRI bersyariahnya, di mana menurutnya konsep negara yang ideal untuk Indonesia adalah yang bersyariah. Menurut Habib Rizieq, penerapan syariat Islam di Indonesia bukanlah sesuatu haal yang berlebihan ataupun mengada-ngada, melainkan sesuatu yang memiliki landasan sejarah dari kultural yang amat kuat. Karena penerapan syariat Islam bukanlah sesuatu yang baru ada setelah kemerdekaan 1945. Bahkan bukan pula baru ada setelah penjajahan Belanda.³

Peningkatan sumber daya manusia yang nantinya akan mendidik kemajuan anak bangsa, serta dalam NKRI mengajarkan kepada kita bahwa arti toleransi dalam tali persaudaraan baik yang bersifat agamis maupun kelompok yang mengarah kepada paham sekularis.

Pentingnya memahami serta mengetahui dasar-dasar politik, agama, ras, suku, dan budaya di negeri ini karena di era 4.0 ini dengan arus globalisasi yang begitu pesat akan perkembangannya terhadap konsep dan pandangan berfikir masyarakat di Indonesianominal yang sering melahirkan sebuah isu-isu politik, ekonomi, bahkan agama, maka dengan hal tersebut pentingnya musyawarah dan berfikir secara dingin untuk mengurangi terjadinya sebuah hal-hal yang tidak diinginkan.

³Abel Herdi Deswan Putra, "Relasi Islam Dan Pancasila Dalam Pemikiran Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Syihab" (Skripsi—Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 85.

Sebuah kepemimpinan yang terbentuk dalam forum pemerintahan di Indonesia sekaligus menjadi sistem yang memiliki ruang atau tempat untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebuah pilar yang juga merupakan bagian dari lahirnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Kebhinekaan.⁴ Indonesia merupakan negara yang memiliki UUD yang di dalamnya terdapat sebuah peran penting dan bagi siapa saja yang melanggar hukum di negeri ini maka memiliki sanksi sesuai dengan apa yang diperbuat oleh tersangka pelanggar hukum.

Dalam kegiatan berorganisasi baik lembaga, instansi atau tingkat mahasiswa dan lain sebagainya orang-orang yang tidak suka dengan hukum atau tatanan akan hukum yang berlaku saat ini adalah salah satunya sumber daya manusia mereka masih harus banyak diasah agar mengerti dan memahami bagaimana hidup di negeri hukum dalam Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku.

Juga didukung melalui referensi pemahaman serta peran Pancasila dimana mengajarkan kepada kita bahwa arti toleransi kehidupan dalam rangka menyambung tali persaudaraan baik yang bersifat agamis maupun kelompok yang mengarah kepada paham aliran sekularis.⁵

Ada beberapa faktor yang dapat menjadi sebuah pemicu persoalan yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita saat ini faktor tersebut yang sering kali

⁴Muhammad Sawir, "Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" *JLAP: journal of Administration Science and Governmental Science* 1, No. 1 (2016), 1-6.

⁵Ibid., 8.

membawa nama agama dan juga melalui media informasi dan komunikasi yang saat ini begitu pesat perkembangannya.⁶ Di era zaman di mana kemajuan teknologi digital saat ini begitu pesat perkembangannya dengan banyaknya kemunculan-kemunculan alat dan teknologi.⁷

Kebutuhan manusia dalam konteks rasa atau keingintahuan masyarakat Indonesia begitu peka terkadang juga sangat rentan terhadap berita atau informasi yang terkadang berbentuk sindiran atau isu yang mengarah kepada tujuan kekuasaan yang dilakukan oleh beberapa instansi, organisasi, maupun kelompok-kelompok kerja yang lain.

Maka dengan pendekatan filsafat hal ini menjadi sangat penting karena salahsatu bentuk teori dari dekonstruksi Jacques Derrida ini bagaimana pentingnya memahami diri tentang asumsi-asumsi yang terkadang bersembunyi dibalik teks.

Di dalam salah satu kritik yang dilakukan oleh seorang ulama' yakni; Habib Rizieq, ia menulis sebuah disertasi dan juga mengamalkannya kepada para pengikutnya tentang NKRI bersyariah, dengan pernyataan tersebut maka muncullah anggapan oleh banyak pihak bahkan Indonesia sendiri di sana terbentuk karena persaudaraan dan sifat nasionalisnya begitu erat dengan pernyataan seorang Habib yang cenderung bahwa NKRI yang ideal adalah harus bersyariah.

⁶Mujiburrahman, *Agama Generasi Elektronik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 53.

⁷Muhammad Ngafifi, "Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial budaya", *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 2, No. 1, (2014), 34.

Penelitian ini ingin mencoba menstabilkan atau menelaah secara komperhensif dan berusaha untuk memahami kalimat atau bahasa hermeneutika sehingga tidak mengurangi rasa hormat kepada pemilik teori baik Habib Rizieq dengan NKRI bersyariah nya dan juga teori hermeneutika dekonstruksi Jacques Derrida.

Di dalam pemikiran atau teori Habib Rizieq tentang NKRI bersyariah di Indonesia maka pentingnya memahami serta mempelajari lebih dalam dengan menyerap sebanyak mungkin sumber-sumber ilmiah, dan buku-buku sejarah dan beberapa karya lainnya yang harapan besar bagi kami adalah dapat mengambil sebuah sikap yang bijaksana berupa makna perspektif hermeneutika dekonstruksi Jacques Derrida sekaligus bisa memberikan solusi betapa pentingnya dan betapa indahnya sebuah perbedaan tanpa harus bercera-berai.

Terjadinya perbedaan itu merupakan suatu hal yang wajar akan tetapi kebutuhan sumberdaya manusia kita terhadap pembacaan sebuah teks itu harus benar dan sesuai dengan literatur akademik, semua hal yang berkaitan dengan keilmuan serta pengetahuan maka hal ini menjadi sebuah modal bagi mahasiswa untuk membuka serta memahami sebuah sudut pandang dari tokoh sekaligus masyarakat yang ada di lingkungan masyarakat khususnya di NKRI.

Pandangan atau sebuah konsep yang melahirkan sebuah kepercayaan pada suatu kumpulan masyarakat yang melahirkan sebuah kelompok dan

sekaligus melahirkan sebuah pandangan baru itu merupakan sebuah keadaan yang sering kita jumpai di Negeri ini.

Pemahaman yang di inginkan oleh anak bangsa serta pendapat atau suara yang baik untuk Indonesia adalah pandangan yang bersih yang lahir melalui hati, bukan dengan emosi apalagi dengan maksud dan tujuan tertentu (negatif), apalagi sampai membuat kerusakan. Indonesia ini negara yang memiliki beragam kepercayaan, maka pentingnya kita dalam menerapkan sikap toleransi sesama manusia.

Indonesia melahirkan anak-anak yang berbakat di dalam bidang apapun, Indonesia juga mampu bersaing dengan negara tetangga baik dalam bidang akademik, maupun non- akademik. Hal-hal yang membuat Indonesia ini bisa bangkit adalah dengan bersatu, gotong royong, tidak ada niat buruk, serta berjuang demi kemajuan Indonesia.

Beberapa pendahuluan yang tercantum pada skripsi ini adalah bagaimana cara memahami sebuah teks dengan teori hermeneutika dekonstruksi Jacques Derrida terhadap konsep NKRI bersyariah Habib Rizieq. Dengan keutuhan dan kesatuan masyarakat Indonesia dalam peningkatan SDM guna kemajuan NKRI ini serta mengurangi angka permasalahan akan perbedaan paham antara satu dengan yang lain.

B Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan beberapa pada kalimat diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep NKRI bersyariah Habib Rizieq di Indonesia?
2. Bagaimana analisis Dekonstruksi Derrida terhadap konsep NKRI Bersyariah Habib Rizieq?

C Tujuan

1. Untuk mengetahui konsep NKRI bersyariah Habib Rizieq.
2. Untuk mengetahui analisis Dekonstruksi Derrida terhadap konsep NKRI Bersyariah Habib Rizieq.

D Kegunaan Penelitian

Atas keseluruhan dasar dari bab 1 diawali dengan latar belakang sampai tujuan penelitian, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi salah satu kontribusi penulis secara pribadi dalam peningkatan sumber daya manusia di Indonesia terkait dengan pengetahuan terkit konsep NKRI bersuariah Habib Rizieq.

Dalam penelitian ini menggunakan kritik Jacques Derrida agar sesuai dengan pendidikan di wilayah Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Islam UINSA. Dalam skripsi ini memaparkan sebuah kajian yang tentu dapat

menjadi sumber referensi bagi pembaca guna meningkatkan pengetahuan tentang metode memahami makna dari sebuah kata atau teks.

E Kajian Terdahulu

Skema umum tentang judul yang penulis teliti ini dapat ditentukan dan didalami dalam riset-riset terdahulu yang sudah dilakukan oleh para akademisi yang berguna untuk menguatkan keseimbangan antara tema dengan alur penelitian. Berikut ini merupakan beberapa kajian terdahulu yang berhasil penulis temukan:

No	Nama	Judul	Diterbitkan	Temuan Penelitian
1.	Dharma Aesyawan dan Mu'adil Raizin	Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Dalam tinjauan Maqasid Syariah	<i>Nizham</i> , Vol. 06, No. 01 (Januari- Juni 2018)	Bahwa sebuah Negara yang memiliki tatanan atau sistem termasuk di Indonesia ini memiliki hukum dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan pasal dan undang-undang, NKRI terbentuk atas sumbangsih dan kerja keras yang dilakukan oleh kebanyakan umat muslim di Indonesia. Oleh karena itu keberagaman dan sikap toleransi di Indonesia ini harus lebih ditingkatkan dengan cara

				meningkatkan sumber daya manusia dengan belajar dan mengaji, harapannya adalah NKRI bukan hanya Disiplin dalam ilmu tetapi juga memiliki kedewasaan dalam bersikap.
2.	Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis dan Syaiful Bahri	NKRI Bersyariah: Praktik Spasial, Representasi Ruang, Ruang Representasion al	<i>Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam,</i> Vol. 10, No. 02 (Oktober 2020)	Penelitian ini menyatakan bahwa ruang representasional dari konsep NKRI Bersyariah berawal dari sejarah berdirinya NKRI itu sendiri, serta diperkuat dengan adanya Dekrit Presiden pada 15 Juli 1945. Hal tersebut membuat perdebatan antara kelompok yang memperjuangkan Indonesia sebagai negara Islam dengan kelompok yang memperjuangkan NKRI berjalan panjang dalam dialektika perdebatan ruang.

3.	Novita Dinar Rahmawati	Respons Muslim Tionghoa Surabaya Terhadap Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersyariah Front Pembela Islam	<i>Skripsi,</i> UIN Sunan Ampel Surabaya (2020)	Penelitian ini mengemukakan bahwa respon muslim Tionghoa cenderung menolak terhadap implementasi dari konsep NKRI Bersyariah. Menurut mereka hal tersebut disebabkan dari latar belakang Indonesia sendiri yang memiliki berbagai macam ras, suku, agama dan budaya, sehingga membuat penerapan konsep tersebut terlihat tidak sesuai.
4.	Nailul Hikam Amaliah	Pandangan Barisan Ansor Serbaguna Gresik Mengenai Konsep NKRI Bersyariah Front Pembela Islam:	<i>Skripsi,</i> UIN Sunan Ampel Surabaya (2020)	Penelitian ini menyatakan bahwa Banser kurang sepatutnya terhadap konsep NKRI Bersyariah yang ditawarkan oleh FPI. Banser menganggap konsep NKRI saat ini sudah final dan sesuai dengan kondisi saat ini, serta mengkhawatirkan dampak dari penerapan NKRI Bersyariah

		Perspektif Kritik Ideologi Max Horkheimer)		tersebut, seperti perpecahan antar bangsa karena latar belakang kemerdekaan Indonesia sendiri tidak hanya dari umat Islam saja, namun juga atas campur tangan dari berbagai suku, agama dan budaya.
5.	A. Yudo Triartanto, Adhi Dharma Suriyanto dan Tuti Mutiah	Dekonstruksi Makna Teks Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Kampanye Lagu “Ingat Pesan Ibu” di Media Youtube: Analisis Hermeneutika Radikal Derrida	<i>Jurnal Mitra Pendidikan</i> , Vol. 05, No. 01 (2021)	Penelitian ini menyatakan bahwa kata “Ibu” dalam lagu <i>Ingat Pesan Ibu</i> merupakan titik pusat dari lagu tersebut yang kemudian secara otomatis membentuk <i>oposisi biner</i> . Hal tersebut menurut Derrida harus dihindari agar makna dari suatu teks senantiasa berkembang dan tidak final pada makna tertentu.

F Metodologi Penelitian

1. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Dalam mengumpulkan sebuah informasi penulis menggunakan metode *library research*, dan akan menganalisis serta mencoba untuk mendeskripsikan tentang kritik konsep NKRI bersyariah Habib Rizieq ditinjau dari perspektif teori hermeneutika dekonstruksi Jacques Derrida. Sebagai referensi data sekunder yakni melalui kamus, jurnal, artikel, majalah, dan hal-hal yang bersifat ilmiah lainnya.⁸

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Karena data yang akan dikumpulkan akan dideskripsikan dengan kata yang lebih mudah untuk dipahami yang bertujuan untuk dapat memahami persoalan ini.

3. Teori

Penelitian ini menggunakan prepektif teori analisis dekonstruksi hermeneutika Jacques Derrida sebagai upaya untuk mencoba memahami lebih dalam terkait kritik konsep NKRI bersyariah Habib Rizieq. Teori juga memberikan sebuah jalan keluar terhadap sistem pernyataan yang saling berhubungan erat dengan konsep-konsep abstrak yang menggambarkan, memprediksi, atau menerangkan secara komprehensif

⁸Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Antasari Press: Banjarmasin, 2011), 60.

terkait hal-hal yang luas tentang gejala yang tidak diukur tingkat kemungkinannya.

Teori dapat dikembangkan, atau dijabarkan kedalam model-model teoretis yang menggambarkan seperangkat asumsi, konsep, atau pernyataan yang saling berkaitan erat yang membentuk dalam sebuah pandangan tentang kehidupan (suatu masalah).

G Sistematika Pembahasan

Berikut ini merupakan susunan sub bab pembahasan yang akan diatur secara terstruktur terkait dengan rancangan penelitian dengan judul “Kritik Konsep NKRI Bersyariah Habib Rizieq Perspektif Teori Hermeneutika Dekonstruksi Jacques Derrida”

Bab pertama, menyusun proposal serta menerangkan beberapa hal yang menurut penulis penting dan memberi panduan awal tentang apa serta hendak kemana riset ini berjalan. Bagian ini dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan tujuan penelitian untuk menjawab masalah, sampai alur pembahasan antar bab.

Bab kedua, menjelaskan tentang teori kritik hermeneutika Jacques Derrida, dan teori tentang konsep NKRI bersyariah Habib Rizieq.

Bab ketiga, akan mengulas NKRI bersyariah Habib Rizieq yang akan ditinjau dalam perspektif teori hermeneutika dekonstruksi Jacques Derrida.

Bab keempat, menganalisa kritik terhadap konsep NKRI bersyariah Habib Rizieq dengan menggunakanperspektif teori hermeneutika dekonstruksi Jacques Derrida.

Bab kelima, menyimpulkan hasil temuan peneliti danhal-hal yang perlu direkomendasikan dalam bentuk saran.



BAB II

KONSEP DEKONSTRUKSI JACQUES DERRIDA

A Faktor Penyebab Dekonstruksi

Pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang menjadi landasan utama munculnya suatu dekonstruksi dari Derrida, diantaranya adalah *metafisika kehadiran*, *logosentrisme* dan *strukturalisme*. Pada masa Derrida, strukturalisme sedang dalam kondisi optimalnya untuk memaparkan suatu kebenaran dan menunjukkan suatu sikap apatis terhadap bahasa. Strukturalisme hanya menganggap bahasa sebagai mediasi dalam menyampaikan suatu konsep pemikirannya secara murni. Oleh sebab itu, penulis pada dasarnya ingin menjelaskan beberapa hal terkait proses munculnya teori dekonstruksi Derrida tersebut melalui paparan sejarah yang sudah ada.

The Metaphysics of Presence atau biasa disebut dengan metafisika kehadiran merupakan suatu tanda mengenai adanya asal usul atau hal yang tidak dihadirkan dalam realitas, dan metafisika ini berada pada logosentrisme. *Logos* atau bahasa dalam konsep logosentrisme sendiri dianggap sebagai suatu ide murni yang bisa ditetapkan menjadi aturan. Eksistensi dari bahasa yang tidak nampak tersebut bisa diakui keberadaannya, hal tersebut seperti gambaran dari suatu sistem yang tidak memiliki bentuk konkret, akan tetapi tetap bisa menjadi suatu aturan yang

mengikat bagi masyarakat tertentu. Metafisika kehadiran sendiri sangat bergantung terhadap suatu kontradiksi yang menjadi landasan utama bagi seluruh bahasa. Derrida mengatakan bahwa mengenai *speech* dan *writing* tidak ada yang bisa disepelekan seperti pernyataan Saussure yang menyatakan bahwa *speech* lebih penting daripada *writing*.¹ Bagi Derrida, *writing* juga tidak kalah pentingnya. Sementara itu, dalam metafisika kehadiran sendiri makna dijamin oleh suatu hal yang transenden, dan makna juga memiliki suatu sifat yang dinamis –tidak pernah otentik-.²

Selain mengkritik mengenai metafisika kehadiran tersebut, Derrida juga mengkritik mengenai logosentrisme-fonosentrisme yang menekankan mengenai adanya suatu instrument yang menjadi titik sentralnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Saussure lebih menekankan aspek *speech* daripada *writing*, sebab menurutnya *speech* lebih kompleks karena suatu ucapan kata yang disampaikan oleh suatu individu tersebut memiliki karakteristik dan keunikannya yang telah menjadi penolakan pada konsep strukturalisme. Hal tersebut disebabkan karena sulitnya suatu ucapan yang memiliki keunikannya masing-masing tersebut untuk diubah dalam bentuk tulisan. Oleh sebab itu, Saussure beranggapan bahwa *writing* tersebut memiliki suatu batasan dan tidak mungkin bisa menampung seluruh ucapan dari setiap *speech*. Berbeda dengan Saussure, Derrida beranggapan bahwa justru melalui *writing* perbedaan pada setiap homofon

¹ Yuwita Margareth, “Dekonstruksi Derrida Terhadap Oposisi Biner dan Munculnya Pluralitas Makna”, (Skripsi—Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2012), 31.

² *Ibid.*

–kata yang sama dalam pelafalan, namun berbeda dalam ejaan kata- dalam setiap *speech* tersebut akan terlihat dan dapat diketahui.³

Tanda linguistik bukanlah suatu contoh yang sederhana dalam konsep logosentrisme, namun menjadi suatu peran penting agar bisa masuk dan memahami logika metafisika kehadiran secara menyeluruh. Derrida sadar bahwa setiap konsep yang menghubungkan metafisika kehadiran adalah suatu narasi, sedangkan narasi hadir dari suatu teks yang kemudian secara tidak langsung teks itu sendiri berhubungan dengan suatu bahasa. Latar belakang tersebut yang membuat Derrida ingin mengakhiri konsep metafisika kehadiran dengan bertolak pada bahasa dalam teks yang mengandung metafisika kehadiran tersebut. Derrida mencoba untuk meneliti suatu teks bisa menjelaskan sesuatu dan menciptakan sebuah praduga berdasarkan struktur yang dibangun di dalamnya. Derrida mencari rencana pembentukan makna dalam teks-teks tersebut, dengan cara menjelaskan sistem dari perlawanan yang tersembunyi atau cenderung didiamkan oleh sang penulis (*system of opposition*). Sebab ciri khas yang menonjol dari logosentrisme adalah suatu paradigma atau pola pikir biner –terdapat dua hal yang berlawanan-, seperti positif-negatif, siang-malam, teks-ucapan, dan lain sebagainya. Pola pikir biner tersebut awalnya tidak menjadi persoalan bagi Derrida, akan tetapi seiring perkembangannya

³ *Ibid.*, 32.

terdapat salah satu term yang mencoba untuk menguasai term lain, hal tersebut yang ingin didekonstruksi oleh Derrida.⁴

Sementara itu, pada strukturalisme sendiri realitas tersebut ditentukan oleh suatu struktur dan prinsip-prinsip tertentu. Derrida mengatakan bahwa strukturalisme mencerminkan keinginan manusia untuk mengontrol dan menyimpulkan fenomena ke dalam cara yang baku atau ketat. Bahasa digambarkan sebagai suatu institusi yang baik cara kerja ataupun bagian-bagian dari sistemnya sebagai sesuatu yang mudah ditebak. Tanda-tanda tersebut kemudian disatukan dalam kerangka yang lebih luas dan memunculkan berbagai macam kategori dari berbagai tanda secara sistematis dan komprehensif. Hal tersebut menurut Derrida yang kemudian menciptakan suatu hal yang bisa dianggap sebagai kekuasaan tersembunyi yang dapat menundukkan suatu objek. Secara tidak langsung konsep strukturalisme tersebut ingin menyampaikan pesan bahwa bahasa merupakan suatu fenomena yang objektif, kemudian dapat disimpulkan secara logis. Mereduksi bahasa ke dalam simbolik menandakan akan suatu kegiatan mengesampingkan pergerakan bahasa untuk menciptakan kemungkinan yang lain.⁵

Dekonstruksi Derrida ingin mencoba untuk membebaskan bahasa dengan mengoptimalkan permainan tanda yang dihindari dari strukturalisme. Bahasa dalam pandangan Derrida merupakan suatu perlombaan untuk terlihat lebih menonjol antara makna dan tanda, bahasa

⁴ Frety Cassia Udang, "Berhermeneutik Bersama Derrida", *Tumou Tou*, Vol. 06, No. 02 (2019), 120.

⁵ Muhammad al-Fayyad, *Derrida* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 64.

sendiri tidak bisa dilepaskan dari sistem pemaknaan dan komunikasi juga tidak bisa terhindar dari sistem tanda. Sementara itu, makna mencerminkan suatu simbol dari sebuah kesadaran, makna menjadi pusat yang melambangkan kondisi ontologis dari sebuah teks yang berhubungan erat dengan subjek, penulis, ego transcendental dan kesadaran murni. Hal tersebut menandakan bahwa strukturalisme masih bisa dianggap sebagai bagian dari logosentrisme, dan strukturalisme juga selalu memahami makna sebagai hasil atau produk dari kehadiran sang subjek –rasio, ada, kesadaran-. Strukturalisme juga beranggapan bahwa terdapat hierarki yang bertingkat dalam bahasa.⁶

Tanda merupakan suatu pelengkap dari sebuah makna, oleh sebab itu tanda hanya berada pada wilayah permukaan saja dan bukan sebagai pondasi dari bangunan teks. Pada dasarnya sebuah teks memang memiliki tujuan untuk menyampaikan makna yang diinginkan oleh penulis. Derrida berpendapat bahwa dalam setiap teks yang memiliki keutuhan makna tersebut pasti akan meninggalkan suatu residu yang tidak mungkin digabungkan dalam suatu bentuk makna yang paten. Oleh sebab itu, bahwa akan sangat tidak mungkin untuk mencari suatu makna secara utuh dari suatu teks, karena pasti ada residu yang akan tertinggal. Hingga pada akhirnya Derrida menyatakan bahwa teks akan senantiasa bersifat intertekstual yang akan menjalin hubungan dengan teks lainnya yang tidak akan pernah selesai untuk mengalami perkembangan tanpa akhir. Hal

⁶ *Ibid.*, 65.

tersebut dikarenakan bahwa suatu teks tersebut adalah sebuah proses yang terbuka pada setiap kemungkinan, dan teks yang hanya berfokus pada makna tidak akan mengalami suatu perkembangan.⁷

B Dekonstruksi Jacques Derrida

Dekonstruksi pada dasarnya merupakan suatu konsep strategi dalam menginterpretasi atau cara dalam membaca suatu teks. Hermeneutika tetap digunakan dalam proses dekonstruksi, akan tetapi hermeneutika yang digunakan sedikit berbeda dengan apa yang dikonsepsikan oleh Dilthey dan Gadamer. Hermeneutika yang digunakan oleh Derrida adalah hermeneutika radikal yang mana kita bebas bermain atau menafsirkan teks tersebut. Hermeneutika tersebut berkontribusi sebagai suatu teknik dan metode dalam membaca agar bisa menemukan *blind spot* atau celah dalam teks tertentu. Dalam metode tersebut Derrida tidak menempatkan suatu batasan tertentu, tidak juga berusaha menyimpulkan, tidak merumuskan kerangka pikiran, serta tidak mendefinisikan maksud dari teks tersebut.⁸

Dekonstruksi sendiri pada dasarnya tidak dapat didefinisikan, tidak memiliki suatu aturan dan prosedur tertentu, serta tidak mengikuti suatu teori tertentu. Akan tetapi McQuillan menyatakan bahwa terdapat beberapa strategi agar bisa memahami dekonstruksi tersebut. *Pertama*, dekonstruksi berposisi sebagai cara. Derrida mengatakan bahwa

⁷ *Ibid.*, 68.

⁸ Joko Siswanto, "Metafisika Derrida", *Jurnal Filsafat*, Vol. 31, No. 01 (2021), 9.

dekonstruksi tersebut “*pas de method*”, dimana kata “*pas*” sendiri memiliki dua makna –bisa bermakna tidak dan juga bisa bermakna langkah- dalam bahasa Prancis. Jadi, dekonstruksi tidak hanya berposisi sebagai metode, namun juga sebagai suatu langkah. Dekonstruksi merupakan suatu peristiwa pembacaan yang mana tidak dapat diulang seperti suatu metode, dekonstruksi memiliki sifat *singular* -tunggal- dan unik karena pada dasarnya ia adalah suatu peristiwa.

Kedua, Dekonstruksi berhubungan dengan suatu penggabungan oposisi-oposisi biner. Oposisi biner merupakan suatu sistem yang terdiri dari dua kategori yang saling berhubungan, dimana pada saat berada dalam bentuk paling murni akan membentuk universalitas. Pada strukturalisme sendiri pandangan mengenai oposisi biner memiliki dua istilah, yakni *superior* –yang lebih unggul- dan *imperial* –yang didiskriminasi-. Oposisi biner tersebut merupakan suatu inti dari strukturalisme yang kemudian mendapat kritik keras dari Derrida karena menjadi pusat seperti yang terjadi pada metafisika kehadiran atau logosentrisme.

Bahasa ada disebabkan oleh adanya suatu sistem mengenai *difference* yang pada intinya adalah oposisi biner. Terdapat dua tahap dalam menempuh dekonstruksi, yakni oposisi biner harus dibalikkan misalkan pria atau wanita menjadi wanita atau pria, lalu ditunjukkan bahwa seluruh makna telah didikte oleh oposisi biner yang menjadi hierarki. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu keseimbangan.

Hingga pada akhirnya seluruh sistem pemikiran mengenai oposisi biner harus dikesampingkan, sehingga istilah-istilah itu dipikirkan tanpa pemikiran biner lagi.⁹

Ketiga, dekonstruksi lebih menekankan pada sesuatu yang *imperial* dalam oposisi biner. Sebagai contoh adalah antara laki-laki dengan perempuan, dimana laki-laki lebih *superior* dibandingkan dengan perempuan. Dekonstruksi Derrida tidak berperan untuk membela sesuatu yang *imperial*, akan tetapi Derrida hanya ingin menunjukkan bahwa *imperialitas* tersebut menjadi suatu proses yang tidak konsisten dengan dirinya sendiri. Derrida juga ingin menunjukkan bahwa terdapat suatu kekuatan dalam teks itu sendiri yang berpotensi untuk mendekonstruksi dirinya sendiri. Tidak stabilnya *imperialitas* tersebutlah yang nantinya menarik dekonstruksi.¹⁰

Keempat, dekonstruksi juga memiliki indikasi sejarah, hal tersebut bisa dilihat dalam oposisi biner yang terjadi dalam sebuah sejarah, dan sejarah tersebut yang menunjukkan letak tidak stabilnya oposisi biner tersebut. Sebagai contoh adalah mengenai konsep “miras”, dimana suatu konsep yang terkait dengan berbagai macam aspek, seperti ekonomi, kesehatan, farmasi, politik, kasusastran, metafisika kehadiran dan lain sebagainya. Hal tersebut menandakan bahwa dekonstruksi juga memiliki faktor historisitas, akan tetapi ciri sejarahnya tidak terikat dengan sejarah, sebab metode pemahaman dekonstruksi tidak dibangun pada suatu konsep

⁹ Mangihut Siregar, “Kritik Terhadap Teori Dekonstruksi Derrida”, *Journal of Urban Sociology*, Vol. 02, No. 01 (2019), 69.

¹⁰ Budi Hardiman, *Seni Memahami* (Yogyakarta: Kanisius, 2015), 280.

pokok yang terdapat pada masa lalu, melainkan membiarkan hal-hal yang terkait dengannya hadir dalam konsep tersebut. Pada akhirnya, juga mendekonstruksi oposisi biner antara historisisme.¹¹

Kelima, pada dekonstruksi tidak ada yang di luar teks, dekonstruksi juga tidak membedakan antara teks dan konteks. Pada dasarnya apa yang telah disebutkan dalam suatu teks -baik persoalan agama, ekonomi, politik, kebudayaan, kesehatan- tidak ada yang berada di luar teks, melainkan telah berada pada teks tersebut. Maka sama benarnya bahwa tidak ada yang lain selain konteks. Dalam dekonstruksi, makna teks mengacu pada rangkaian jejak-jejak, yaitu konteks-konteks di dalam sebuah teks, yang memberi makna pada teks. Setelah mengetahui kelima strategi dalam memahami dekonstruksi, ditemukan bahwa dekonstruksi merupakan bentuk interpretasi teks yang dilakukan secara radikal, yang kemudian dekonstruksi juga dikenal sebagai hermeneutika radikal. Di dalam dekonstruksi mengandaikan ketiadaan makna primordial, makna tidak lagi dapat diputuskan, sesuatu usaha dalam menentukan makna selalu diintai oleh sesuatu makna yang ingin diputuskan. Dekonstruksi adalah sebuah interpretasi “pergantian-perspektif yang tak terhingga”.¹²

Dekonstruksi juga disebut dengan *hermeneutics deep* karena pada dekonstruksi suatu interpretasi tidak bisa dilihat dari benar atau salah, akan tetapi lebih menekankan pada kuatnya suatu argumentasi, selain itu juga terdapat kecurigaan yang sangat mendalam pada keretakan yang ada dalam

¹¹ *Ibid.*, 281.

¹² *Ibid.*, 285.

suatu teks. Cara dekonstruksi adalah dengan mengurai, menganalisis, serta membongkar beragam jenis asumsi yang ada pada suatu teks ataupun narasi, termasuk paradigma berpikir logosentrisme yang dasar pemikirannya terdapat pada oposisi biner. Oleh sebab itu, dekonstruksi Derrida bertujuan untuk menampilkan dan menunjukkan ketimpangan pada konsep dan cara berpikir oposisi biner tersebut.¹³

Dekonstruksi yang berposisi sebagai *hermeneutics deep* bisa dirumuskan dalam beberapa strategi, *pertama*, memberi jarak terhadap teks untuk memberi sudut pandang yang lebih luas dan dapat menunjukkan keberadaan dari prinsip keretakan pada setiap teks, hingga pada akhirnya dapat menghasilkan suatu kebenaran yang objektif dari sistem tanda. *Kedua*, dekonstruksi menyingkap pusat teks karena pada dasarnya setiap teks yang disampaikan memiliki tujuan khusus tersendiri – biasanya terdapat dalam judul-. Fungsi dari pusat teks itu sendiri adalah sebagai alat untuk menghindari permainan makna dalam suatu teks.¹⁴

1. *Differance*

Differance merupakan suatu perpaduan dari kata *differing* yang memiliki arti “berbeda” dan dengan kata *deffering* yang memiliki arti “menangguhkan”. Pengucapan *differance* akan terdengar sama dengan kata *difference*, namun akan terlihat perbedaan antara kedua kata tersebut jika sudah dituangkan dalam bentuk tulisan, yakni yang terdapat pada huruf “a” dan “e”. Melalui hal ini Derrida ingin

¹³ Akhyar Lubis, *Filsafat Ilmu* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 204.

¹⁴ Haryatmoko, *Critical Discourse Analisis* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 216-217.

menunjukkan kelebihan dan keunggulan dari suatu hal –tulisan- yang tidak dimiliki sesuatu yang lain –bunyi-, hal tersebut sekaligus merupakan suatu bentuk antithesis dari dominasi tuturan dalam strukturalisme. *Differance* juga berposisi sebagai kunci dalam konsep dekonstruksi Derrida yang bertujuan untuk membongkar instabilitas bahasa. *Differance* tersusun dari suatu perbedaan dan menunda pemaknaan sampai mencapai kondisi stabil.¹⁵

Differance pada dasarnya terdapat pada berbagai macam hal, seperti suatu teks, konsep pemikiran, serta suatu institusi penafsiran, dan berbagai macam hal lain yang ingin melakukan suatu pembekuan terhadap makna sehingga hanya terdapat satu penafsiran yang nantinya akan dipergunakan untuk menafsirkan hal lain secara tunggal pula. *Differance* memiliki unsur perbedaan tanpa dipengaruhi oleh tingkatan hierarki, sehingga membebaskan dalam menerima berbagai macam perbedaan yang kemudian dapat memunculkan suatu makna dan struktur yang baru. Berbeda dengan oposisi biner yang terbelit dengan hierarki, sehingga membuatnya harus mengutamakan salah satu aspek dan mendriskriminasi aspek yang lain.

Differance juga biasa disebut sebagai “batu nisan” bagi logosentrisme yang sangat mengagungkan kejelasan suatu makna dan menghindari dualisme makna. Hadirnya *Differance* juga berperan besar dalam mengembalikan fungsi permainan logika atas logika

¹⁵ Marcelus Ungkang, “Dekonstruksi Derrida Sebagai Strategi Pembacaan Teks Sastra”, *Jurnal Pendidikan Humaniora*, Vol. 01, No. 02 (2013), 31.

pengarang. Oleh karena itu, hal yang paling utama dicari bukanlah kebenaran, makna ataupun referensi yang terdapat dalam teks. *Difference* secara berkesinambungan mempersoalkan berbagai macam asumsi yang dianggap sudah stabil dan mapan, kemudian mengujinya dengan berbagai kemungkinan yang ada secara radikal, paradok dan absurd.¹⁶

Pencarian makna selalu berupa jejak setelah jejak, istilah yang digunakan Derrida (*signifier of signifier*) penanda dari pada penanda. Tanda bagi Derrida mempresentasikan kehadiran sesuatu itu pada ketidakhadirannya. Kehadiran tidak dapat berdiri sendiri seperti yang terjadi pada metafisika kehadiran, kehadiran tergantung pada tanda, dan tanda selalu terkait dengan *difference* (perbedaan dan penundaan) atau *traces of traces* (jejak dari jejak). *Difference* bisa dikatakan permainan perbedaan-perbedaan, jejak-jejak dari perbedaan. Tanda memungkinkan akan munculnya makna dan tidak mengikat konteks tertentu, ia harus dapat digunakan dalam berbagai konteks, tanda selalu terikat dengan tanda lainnya. Tanda tidak bisa dipahami secara langsung karena tanda itu dipengaruhi oleh penundaan. Oleh sebab itu kehadiran sebagai tanda menunjukkan perbedaan dan sekaligus penundaan, ia akan terkait dengan jejak yang bergerak sesuai teks dan konteks.¹⁷

2. *Trace*

¹⁶ Eko Ariwidodo, "Logosentrisme Jacques Derrida dalam Filsafat Bahasa", *Jurnal Karsa*, Vol. 21, No. 02 (2013), 349.

¹⁷ Siregar, *Kritik Terhadap Teori*, 73.

Istilah *trace* –goresan atau jejak- pada awalnya digunakan oleh Martin Heidegger yang kemudian diadopsi oleh Derrida dan memiliki suatu makna bukti *absence of presence* –ketidakhadiran-. Derrida kemudian menganggap bahwa tanda adalah sebuah *trace*, sementara itu *trace* sendiri tidak memiliki substansi dan hanya berperan sebagai penunjuk arah menuju suatu hal yang lain. *Trace* berperan sebagai penyebab dan mendahului objek, paham tersebut memberi kemungkinan bahwa kehadiran merupakan suatu dampak yang dihasilkan dari *trace*. Oleh sebab itu, kehadiran bukanlah suatu hal yang asli, namun hasil dari *trace*. Pada konsep ini sebuah tanda atau *trace* tidak dianggap sebagai suatu hal yang bersifat sementara, sebab apabila *trace* dihilangkan, maka kehadiran akan ikut hilang. Selain itu, usaha untuk menghilangkan *trace* akan menimbulkan *trace* lain secara otomatis.¹⁸

Differance sebagai akar bersama perbedaan diletakkan di bawah *saussure*. Peletakan yang dimaksud adalah ketika sudah mencapai suatu makna, maka makna secara otomatis terhapus, ia menandakan bahwa tidak ada yang stabil, misal ketika *here* (di sini) ingin menuju *there* (di sana), setelah sampai pada *there* (di sana) maka *there* itu secara otomatis menjadi *here* (di sini), dan *there* yang menjadi *here* akan berlari lagi menuju *there* yang lain dan begitupun seterusnya, dengan demikian sebenarnya tidak akan pernah *here* menjadi yang

¹⁸ Margareth, *Dekonstruksi Derrida*, 45.

there. There yang terus berlari menuju pada yang lain dan *here* akan tetap menjadi *here* meski sudah mencapai *there*, hal ini menunjukkan bahwa yang ada hanyalah jejak atau *trace* dan ini berada pada *différance* yaitu membeda sekaligus menunda. *Différance* antara *here* dan *there* diposisikan di bawah *saous reture* yang berakibat pada *here* dan *there* memiliki makna sesuai dengan konteksnya.¹⁹

Dengan adanya *trace* menunjukkan bahwa yang berbeda itu sebenarnya hanya menunda dan tidak pernah mencapai objeknya, dan juga menunjukkan makna tidak ada yang universal dan transenden, maka tidak akan absolut. Teks tidak akan bisa berdiri sendiri, teks yang beredar merupakan *trace*, ia seperti *trace* yang selalu terikat dengan lainnya. Hal ini menjadikan teks menyebar, hubungan antara teks dengan teks akan menciptakan maknanya sendiri bagi pembacanya. Pembaca akan berbeda memaknai, ini terjadi karena pembaca berada pada *trace* yang tidak lepas dari teks lain, perbedaan makna ini akan selalu ditunda, karena makna yang diciptakan pembaca suatu saat berubah sesuai konteks yang lain, dan tidak ada makna absolut, ia terus beragam. Misal ketika saya membaca mengenai pisau dan memaknainya sebagai alat potong, seketika itu makna itu bisa berubah ketika pisau digunakan untuk membunuh, konteksnya berubah, maknanya pun akan berubah.²⁰

3. *Dissemination*

¹⁹ *Ibid.*, 52.

²⁰ *Ibid.*, 53.

Diseminasi –penyebaran- memberikan suatu strategi unik yang memperlihatkan kesulitan dalam menangkap suatu makna, kecuali memanfaatkan teks sebagai arena permainan yang terus menerus ditranformasi dengan mengganti penanda lama dengan suatu penanda yang baru. Permainan terhadap tanda tersebut secara tidak langsung akan menunda suatu petanda yang akan disimpulkan nantinya. Diseminasi tanda membuat tidak stabil seluruh sistem teks yang pada awalnya stabil. Setelah merobohkan suatu susunan bangunan tersebut, Derrida kemudian menyusun sisa bangunan itu kembali, setelah itu merobohkan dan menyusunnya kembali secara bergantian dan terus menerus tanpa akhir.²¹

Makna bagi Derrida tidak terpaut pada satu petanda, seperti yang terjadi pada konsep strukturalisme. Makna bersifat temporer kerana relasi antar tanda. Makna akan mungkin hadir jika diseminasi ini ada, karena ketidakhadiran diseminasi berarti tidak hadirnya makna, diseminasi menunjukkan penyebaran makna. Makna-makna tersebar dalam jaringan penanda, oleh karenanya makna tidak dapat hadir pada dirinya sendiri, makna itu terikat dengan yang lainnya. Hal ini akan terus terjadi pada diseminasi (penyebaran). Pada ahirnya tidak ada yang menjadi akar dan yang ada hanyalah peyebaran yang terus berubah, bergerak, dan menunda.²²

²¹ Fayyad, *Derrida*, 79.

²² Margareth, *Dekonstruksi Derrida*, 46.

Menurut Tyson terdapat beberapa langkah untuk memahami diseminasi Derrida. *Pertama*, menulis berbagai jenis interpretasi baik istilah kunci, logika, asumsi-asumi, dan lain-lain yang ditawarkan dalam teks. *Kedua*, tunjukkan berbagai jenis interpretasi-interpretasi tersebut berkonflik antara satu dan lainnya. *Ketiga*, tunjukkan bahwa konflik tersebut menghasilkan berbagai interpretasi lain yang juga berpotensi menghasilkan konflik, yang kembali menghasilkan interpretasi lainnya. *Keempat*, gunakanlah langkah satu, dua dan tiga untuk menyatakan bahwa sebuah teks tidak dapat dirumuskan dalam satu pengertian tunggal (*undecidability*). Tyson juga mengungkapkan bahwa istilah *undecidability* (tidak ada putusan) tidak berarti pembaca tidak dapat menempatkan makna, namun ketiadaan putusan memiliki arti bahwa teks dan pembaca tidak terpisah dari ikatan diseminasi makna bahasa, hal ini juga disebut *differance*.²³

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²³ Ungkang, *Dekonstruksi Jacques*, 37.

BAB III

KONSEP NKRI BERSYARIAH HABIB RIZIEQ

A Potret Keberagaman di Indonesia

Keberagaman atau pluralisme yang terdapat di Indonesia tidak bisa dipungkiri lagi, hal tersebut bisa terlihat dari berbagai macam suku, budaya, serta agamanya. Bahkan sebelum kedatangan agama-agama samawi ke Indonesia, bangsa ini sudah memiliki berbagai macam konsep kepercayaan, seperti animisme¹ dan dinamisme. Kepercayaan tersebut pada dasarnya memiliki keyakinan bahwa alam semesta adalah suatu kekuatan spiritualitas yang dapat menyeimbangkan serta memberikan suatu pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi umat manusia.

Pada dasarnya penduduk Indonesia dewasa ini mayoritas memeluk agama Islam, sedangkan agama Hindu, Budha, Kristen dan Konghucu sebagai minoritas. Namun, hal tersebut tidak menjadikan konsep atau ideologi Islam sebagai suatu ideologi bangsa Indonesia, hal ini dibuktikan dengan landasan negara yang digagas oleh para pendiri bangsa yang memiliki latar belakang berbeda-beda, baik yang memiliki latar belakang agamis maupun sekuler. Akan tetapi para tokoh pendiri bangsa tersebut

¹ Animisme merupakan suatu aliran kepercayaan yang berpendapat bahwa roh mendiami berbagai macam benda –pohon, batu, gunung, dan sebagainya- yang dianggap dapat memberikan panduan dalam berbagai macam hal. Sementara itu dinamisme merupakan suatu kepercayaan berbagai macam hal memiliki suatu tenaga atau kekuatan tertentu yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Lihat: <https://www.encyclopedia.com/philosophy-and-religion/other-religious-beliefs-and-general-terms/religion-general/animism> & <https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/dynamism>, Diakses pada 20 November 2021.

memiliki keseragaman dalam kerangka berfikir, yakni untuk mengikat berbagai macam elemen bangsa dalam satu negara Indonesia.

Potret keberagaman tersebut bisa terlihat di kawasan Puja Mandala-Bali. Puja Mandala merupakan suatu kawasan ko-eksisistensial yang dapat mempertemukan antar pemeluk agama dalam menjalankan praktek keagamaannya. Pada kawasan tersebut, pemeluk agama dari masing-masing agama memiliki kesetaraan hak dalam menunjukkan ekspresi transendentalnya berdasarkan sistem dan tata cara kepercayaannya masing-masing. Hal tersebut dibuktikan dengan dibangunnya 5 tempat ibadah bagi masing-masing agama, yakni *Pura Jagat Natha Nusa Dua* bagi umat Hindu, *Wihara Budha* bagi umat Budha, *Gereja Katolik Paroki Maria Bunda Segala Bangsa* bagi umat Katolik, *Gereja Protestan* bagi umat Protestan dan *Masjid Agung Ibnu Batutah* bagi umat Islam. Tempat-tempat ibadah tersebut hingga saat ini menjadi tempat persinggahan bagi banyak kalangan, baik dari pemeluk agama yang hidup di sekitar kawasan Puja Mandala maupun para pendatang atau pengunjung yang tengah berkunjung untuk liburan atau kegiatan lainnya di Bali.²

Potret lain dari keberagaman yang terdapat di Indonesia ini adalah dengan adanya tradisi *Grebeb* yang terdapat di kawasan Yogyakarta, khususnya *Grebeg Sudiro* yang ada di kampung Sudiroprajan. Tradisi ini pada dasarnya dirayakan setiap menjelang Tahun Baru Imlek. Tema yang

² Fathor Rahman, "Potret Sosial Keberagaman yang Harmonis di Puja Mandala, Nusa Dua Bali", *Al-Izzah*, Vol. 14, No. 01 (2019), 61-62.

diusung pada acara ini juga lebih sering berkaitan dengan kebhinekaan maupun keberagaman. Hal tersebut disebabkan karena latar belakang dari masyarakat Sudioprajan sendiri sangat beragam dalam unsur-unsur budaya.³ Bahkan unsur-unsur budaya yang dimasukkan dalam acara tersebut tidak terdapat adanya dominasi dari salah satu etnis, berbagai macam budaya yang dimasukkan memiliki porsi yang sama dan sesuai.

Bagi masyarakat Sudioprajan, salah satu bentuk dalam menjaga keharmonisan dalam keberagaman yang ada adalah dengan melibatkan masing-masing anggota kelompok dari suatu etnis dalam suatu kegiatan kemasyarakatan. Hal tersebut secara tidak sadar akan menimbulkan rasa saling memiliki sehingga mampu menjaga budaya dan tradisi yang telah ada sebelumnya. Rasa kebersamaan dan saling memiliki tersebut yang kemudian menjadikan masyarakat Sudioprajan mempunyai keinginan untuk mengekspresikannya dalam ruang publik. Hal tersebut yang kemudian mewujudkan dalam Grebeg Sudiro. Grebeg Sudiro ini menjadi simbol akan keberagaman dan kesatuan masyarakat Sudioprajan sekaligus simbol untuk menunjukkan bahwa masyarakat Sudioprajan ini mempunyai kesadaran kolektif.⁴

Selain Puja Mandala dan Sudioprajan, terdapat juga desa Panji Anom yang terdapat di kabupaten Buleleng. Salah satu contoh keberagaman yang terdapat di desa tersebut adalah pada saat hari raya Nyepi, umat muslim di desa Panji Anom tidak membunyikan pengeras

³ Latifa Dinar Rahmani Hakim, "Grebeb Sudiro dan Representasi Keberagaman di Sudioprajan Kota Surakarta", *Lasigo*, Vol. 02, No. 01 (2020), 7.

⁴ *Ibid.*, 9.

suara dan begitupun pada saat terdapat umat muslim yang meninggal juga dilibatkan polisi tradisional –biasa disebut pecalang- untuk membantu proses pelaksanaan penguburan jenazah, dimana hal tersebut sesuai dengan makna dari *tat twam asi* dan juga *sagilik saguluk salunglung sabayantaka* yang merupakan suatu ciri dari masyarakat Bali yang memiliki makna bahwa kita sama dan kita bersatu padu untuk mewujudkan perdamaian.⁵

Selain itu tidak adanya diskriminasi baik dari faktor etnis maupun agama yang dilakukan oleh jajaran pemerintahan desa Panji Anom tersebut. Kepala desa menerapkan kesetaraan dalam kebijakan desanya tanpa memandang latar belakang agama. Hal tersebut bisa dilihat pada saat perayaan Nyepi, dimana pada saat pengarakan *ogoh-ogoh* tidak hanya warga umat Hindu saja yang mengaraknya, akan tetapi umat Muslim dan Kristen juga turut serta dalam pengarakan tersebut. Begitupun sebaliknya, ketika umat muslim memiliki suatu perayaan ataupun kegiatan seperti Idul Fitri, umat Hindu turut serta meramaikannya. Pemerintah desa juga mempunyai program suka duka, pada saat Natal tiba pemerintah desa memberikan bantuan berupa uang, sementara pada saat Idul Adha pemerintah desa memberikan satu kambing untuk setiap Masjid yang ada di desa tersebut. Selain itu juga terdapat program tentang pemeliharaan tempat-tempat ibadah dengan cara merehab pura, masjid, dan gereja agar

⁵ Kadek Perdiana dan Gede Deva Maruta Ambara, “Potret Harmonis Masyarakat Multikultur di Desa Panji Anom”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 01, No. 01 (2015), 26.

tidak ada ketimpangan antara tempat ibadah umat Hindu dengan yang lainnya.⁶

Melihat dari beberapa fakta yang telah terjadi di berbagai daerah tersebut menandakan bahwa keberagaman dan toleransi yang terdapat di Indonesia ini sangat kental adanya. Perbedaan agama merupakan suatu perbedaan dalam keyakinan dan keyakinan tersebut bersumber dari dalam diri setiap individu, sehingga tidak bisa dipaksakan terhadap satu individu tersebut untuk mengikuti keyakinan tertentu. Oleh sebab itu, toleransi atas keberagaman yang ada dalam negeri ini harus senantiasa diterapkan agar tidak muncul suatu konflik yang bisa memecah belah keutuhan bangsa dan negara.

B Selayang Pandang Habib Rizieq Shihab

Habib Rizieq Shihab adalah seorang imam besar organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI). Habib Rizieq merupakan seorang putra dari pasangan Habib Husein Syihab dan Sidah al-Attas dan lahir pada tanggal 24 Agustus 1965 di Jakarta. Habib Rizieq berkediaman di jl. Petamburan III no. 83 Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan beliau juga tidak lahir dalam lingkungan pesantren. Akan tetapi, sejak kecil beliau memiliki semangat belajar yang sangat besar, terlebih lagi mengenai persoalan agama, dan bahkan pada usia empat tahun beliau turut serta dan rajin mengaji di masjid-masjid.

⁶ *Ibid.*, 26-27.

Habieb Rizieq sendiri pada dasarnya lahir dari sosok keluarga yang sederhana dan ayahnya sendiri termasuk salah seorang pejuang kemerdekaan. Habib Husein Syihab sendiri lahir pada tahun 1920-an dan wafat pada tahun 1965 di Jatinegara. Habib Husein pernah berkata pada salah seorang keluarganya sebelum beliau wafat “Tanyakan kepada putra saya ini, jikalau sudah besar nanti ingin menjadi pendekar atau ulama. Kalau ingin menjadi seorang pendekar atau jagoan, maka berikan ia golok. Sedangkan kalau ingin menjadi ulama, maka didik agamanya dengan baik”. Setelah ditinggal oleh ayahnya, sang ibu berjuang seorang diri menjadi perias pengantin dan penjahit pakaian agar bisa memenuhi kebutuhan hidup, dan ibunya sendiri wafat pada 19 Desember 2012.⁷

Habib Rizieq menikah pada 11 September 1987 dengan Syarifah Fadhlun dan dikaruniai 7 orang putrid, yakni Rufaidah Syihab, Humaira Syihab, Zulfa Syihab, Najwa Syihab, Mumtaz Syihab, Fairuz Mumtaz dan Zahra Syihab. Farwah menjelaskan bahwa pada masa awal setelah menikah, Habib Rizieq diharuskan untuk meninggalkan istrinya dikarenakan untuk melanjutkan pendidikan di Riyadh dan akan pulang ke Indonesia setiap setahun sekali. Setelah kelulusannya, Habib Rizieq pulang ke Indonesia dan dikaruniai putrid pertamanya yang bernama Rufaidah Syihab. Hingga pada akhirnya Habib Rizieq mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya, akan tetapi ditolaknya

⁷ Farwah Quraisyiah, “Pemikiran Dakwah Habib Muhammad Rizieq Husein Syihab, MA”, (Skripsi—Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 26.

dikarenakan Habib Rizieq ingin lebih fokus untuk berdakwah terlebih dahulu di Indonesia, serta lebih banyak berkumpul dengan keluarganya.⁸

Keluarga memandang Habib Rizieq merupakan sosok ayah dan suami yang baik, adil tanpa membedakan anak baik yang pertama maupun yang terakhir, serta tegas dalam membela mana yang *haq* dan menumpas yang *bathil*. Habib Rizieq termasuk tegas dalam berbagai macam hal, baik dalam peraturan rumah ataupun peraturan yang sudah ada hukumnya, seperti tidak mengizinkan anaknya mengendarai motor jika belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Sementara itu, kebanyakan orang menilai Habib Rizieq itu sebagai sosok yang kasar seperti yang sering disampaikan oleh berbagai macam media informasi. Akan tetapi, sejatinya adalah Habib Rizieq senantiasa menerapkan hukum-hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah dalam kehidupannya sehari-hari –baik secara individu maupun kelompok-. Farwah juga menyampaikan bahwa Habib Rizieq merupakan sosok yang ramah, murah senyum serta humoris yang bisa beliau tempatkan pada porsinya masing-masing.⁹

Perihal pendidikan sendiri, Habib Rizieq memulai pendidikannya di SDN 1 Petamburan dan dinyatakan lulus pada tahun 1975. Setelah itu beliau melanjutkan sekolahnya di SMP 40 Pejompongan, akan tetapi tidak bertahan lama dan pindah ke SMP Kristen Bethel Petamburan disebabkan jarak sekolah sebelumnya terlalu jauh dari rumahnya. Meski bersekolah di

⁸ *Ibid.*, 27.

⁹ *Ibid.*, 28.

sekolah yang memiliki latar belakang beda agama –Kristen-, Habib Rizieq tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif dari penghuni sekolah tersebut, bahkan hingga saat ini Habib Rizieq masih menjalin hubungan baik dengan pendeta dan masyarakat Kristen yang berada di sekitar lingkungan beliau. Hingga pada akhirnya Habib Rizieq dinyatakan lulus dari sekolah tersebut pada tahun 1979.

Ketika menginjak masa SMA, Habib Rizieq bersekolah di SMA Islamic Village yang berada di wilayah Tangerang dan berhasil lulus dengan disertain beasiswa untuk melanjutkan studinya di King Saud University yang berada di Riyadh, Arab Saudi, dengan mengambil jurusan Fiqh dan Ushul. Pendidikan tinggi tersebut Habib Rizieq selesaikan dalam waktu empat tahun dengan predikan *Cumlaude*. Pada masa pendidikan tingginya tersebut, teman-temannya sering menyebutnya sebagai kutu buku sebab terlalu seringnya beliau menghabiskan waktu dengan membaca buku. Habib Rizieq sendiri dalam membaca buku tidak hanya yang berhubungan dengan agama saja, akan tetapi juga menyentuh hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, hukum, maupun politik –baik nasional ataupun internasional-. Pendidikan tingginya tersebut kemudian beliau lanjutkan di University Antar Bangsa yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia dengan jurusan Studi Islam. Dengan berbagai latar pendidikan yang luar biasa tersebut, tidak heran jika Habib Rizieq menghasilkan beberapa karya baik berupa buku, seperti *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, *Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah*, *Hancurkan*

Liberalisme Tegakkan Syariat Islam, dan Markaz Syariah. Selain itu beliau juga menerbitkan suatu rekaman *mp3* yang berisikan ceramah beliau yang membahas mengenai berbagai macam ilmu keislaman.¹⁰

C Konsep NKRI Bersyariah

Pada awal tadi sudah dipaparkan mengenai betapa beragamnya Indonesia ini, baik dari faktor budaya maupun agama. Sementara itu, Islam sendiri merupakan mayoritas agama yang dianut oleh penduduk di Indonesia, dan dengan keberagaman tersebut tentu akan sangat beragam pula metode dan sarana dakwah yang digunakan. Melihat dari masa ke masa, umat Islam memiliki peran yang tidak kalah penting dalam memperjuangkan NKRI baik pada saat penjajahan –bisa dilihat dari banyaknya pahlawan-pahlawan Islam yang berkontribusi- maupun ketika sudah merdeka. Sesuai dengan realita sejarah yang sudah ada tersebut, maka tidak bisa diabaikan mengenai perjuangan umat muslim dan juga menjadi saksi atas kontribusi dalam memperjuangkan keutuhan dan kemakmuran negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini.¹¹

Sejarah juga membuktikan bahwa penerapan syariat Islam bukanlah suatu hal yang awam atau baru diterapkan di Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dimana terdapat berbagai macam kerajaan, prasasti, adat dan budaya serta sebutan bagi para raja atau sultan terdahulu yang menandakan bahwa terdapat

¹⁰ *Ibid.*, 29-33.

¹¹ Farid Naser, “Kritik Ideologi Terhadap Gerakan Radikalisme Front Pembela Islam”, (Skripsi—Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 42.

sentuhan Islam yang dijadikan sebagai sumber hukum di dalamnya. Sebagai contoh dalam kesultanan Aceh pada abad ke-16M terdapat suatu kisah yang menyatakan bahwa sultan Iskandar Muda (1603-1637M) pernah memberikan hukuman *rajam* kepada putra kandungnya sebab telah diketahui melakukan hubungan zina dengan istri dari seorang bangsawan istana. Selain itu juga terdapat suatu kitab yang dikarang oleh Syeikh Abdurrouf Syiah Kuala yang berjudul “*Mir’ah at-Thullab*”. Kitab tersebut dikarang atas perintah dari sultan Shafiatuddin Syah (1641-1675M) yang digunakan sebagai rujukan hukum pada masa itu. Hal tersebut menandakan bahwa penggunaan hukum atau syariat Islam dalam bernegara sudah ada sebelum Belanda datang menjajah, dan pada kerajaan Indonesia saat itu dalam sistem kenegaraannya merujuk pada sumber hukum Islam.¹²

Melihat dari sejarah tersebut, bukan hal yang berlebihan jika syariat Islam tersebut lebih digaungkan lagi di Indonesia, sebab memang sudah ada landasan historis yang sudah jelas. Akan tetapi, dewasa ini upaya untuk mewacanakan kembali syariat Islam tersebut menuai berbagai macam tanggapan, baik ada yang setuju ataupun yang mengkritik. Pada dasarnya kelompok yang setuju dengan wacana tersebut mengharapkan suatu pemimpin negara yang mampu menjadikan negara ini bersih dari maksiat, korupsi dan berbagai macam hal negatif lainnya. Harapan dari penerapan negara bersyariah yang dalam konteks ini adalah NKRI

¹² Habib Rizieq Syihab, “Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia” (Disertasi--Universitas Malaya, 2012), 164-166.

bersyariah adalah ingin memberikan suatu hal sebagai solusi atas kurang berhasilnya mencapai tujuan kemerdekaan yang penduduknya kebanyakan dari orang muslim.¹³

Hal tersebut dilatar belakangi oleh pernyataan yang terdapat dalam UUD 1945 yang mana NKRI berdiri dengan beberapa tujuan diantaranya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Akan tetapi pada kenyataannya beberapa tujuan tersebut masih belum bisa dikatakan tercapai, meski Indonesia sudah dinyatakan merdeka secara formal, namun masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan kemerdekaan tersebut. Salah satu contohnya terdapat dalam faktor ekonomi banyak aset negara yang dijual, kekayaan alam yang justru dinikmati oleh warga asing dan banyak barang yang diimpor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Habib Rizieq menganggap bahwa hal tersebut disebabkan oleh kurangnya rasa syukur dari warga negara Indonesia atas apa yang telah diberikan oleh Allah SWT, serta hal tersebut menandakan bahwa kegagalan NKRI ini dikarenakan tidak diterapkannya secara maksimal syariat Islam dalam sistem undang-undang yang ada di NKRI. Habib Rizieq juga memberikan solusi bahwa jalan keluar dari permasalahan tersebut adalah dengan cara taubat dengan skala besar dan kembali kepada syariat Islam secara menyeluruh.¹⁴

¹³ Habib Rizieq Syihab, *Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah* (Jakarta: Suara Islam Press, 2012), IX.

¹⁴ *Ibid.*, X.

NKRI bersyariah yang dimaksud disini adalah suatu konsep dimana NKRI dalam melakukan berbagai macam fungsi pemerintahannya dengan memprioritaskan berdasar pada syariat Allah SWT. Hal tersebut berarti memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah –baik pemimpin negara maupun para anggota dewan dibawahnya- mengelola NKRI dengan berpedoman kepada syariah Islam. Pada kasus ini al-Qur'an dan sunnah menjadi hukum dan undang-undang tertinggi, serta sebagai sumber hukum terhadap semua peraturan perundang-undangan yang ada dalam NKRI. Sehingga pada sila pertama dalam pancasila yang berbunyi “Ketuhanan yang maha Esa” secara tidak langsung akan pasti terlaksana dengan baik, dan tidak akan diselewengkan dengan adanya UU anti Tuhan yang diterapkan oleh sosialis komunis maupun anti kekuasaan Tuhan yang diterapkan oleh sekularis liberalis.¹⁵

Pada dasarnya konsep yang telah dilayangkan oleh Habib Rizieq tersebut tidak bertentangan dengan apa yang telah diutarakan Soekarno pada pidatonya 1 Juni 1945 yang menyatakan bahwa tidak terdapat larangan dalam memperjuangkan tuntutan maupun hak-hak Islam, namun tuntutan tersebut harus dilakukan secara resmi melalui lembaga negara – DPR dan MPR-.¹⁶ Sementara itu, perihal Habib Rizieq dalam konsepnya tersebut menekankan untuk menerapkan kembali pasal 29 ayat 1 UUD 1945 –percaya kepada Tuhan dengan kewajiban menjalankan syari'at

¹⁵ *Ibid.*, XI.

¹⁶ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis dan Syaiful Bahri, “NKRI Bersyariah: Praktik Spasial, Representasi Ruang, Ruang Presentasional”, *Al-Daulah*, Vol. 10, No. 02 (2020), 228.

Islam bagi pemeluk-pemeluknya- yang merupakan salah satu isi dari Piagam Jakarta sebelum diamandemen.¹⁷

Konsep penegakan Islam yang telah diwacanakan oleh FPI pada dasarnya tidak mengharuskan Indonesia menjadi negara seperti Arab Saudi, akan tetapi Indonesia harus tetap mempertahankan berbagai macam ciri khasnya. Maksud dari FPI tersebut yaitu yang wajib menerapkan syariat Islam secara kaffah adalah bagi mereka yang memeluk agama Islam dibawah naungan NKRI. Oleh sebab itu, pemberlakuan konsep NKRI Bersyariah tersebut di Indonesia pada dasarnya memang sudah berlandaskan idiil maupun konstitusional negara Indonesia, yakni pancasila dan UUD 1945. Selain itu juga disebabkan oleh latar belakang negara Indonesia yang mana mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam, maka penerapan konsep NKRI bersyariah tersebut menjadi wajar sebab umat Islam memang sudah seharusnya patuh terhadap syariat-syariatnya. Sedangkan perihal kelompok minoritas atau penduduk dengan agama Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu akan tetap mendapat perlindungan dengan ketentuan syariat Islam tersebut, serta tidak mengurangi hak yang didapatkan, sebab pada dasarnya syariat Islam mempunyai konsep toleransi dan melindungi terhadap kelompok yang bukan termasuk dari golongan mereka.¹⁸

¹⁷ Sila pertama berbunyi “Percaya kepada Tuhan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Lihat: Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3S, 1985), 108.

¹⁸ *Ibid.*, 234.

Habib Rizieq dalam buku wawasan kebangsaan juga menjelaskan mengenai konsep pemimpin yang amanah dalam Islam, yakni pemimpin yang jujur, tulus, adil, dan bertanggung jawab. Seperti yang sudah dijelaskan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis shohih adalah bahwa ketika hari akhir ada kelompok orang yang mendapat jaminan dari Allah yakni pemimpin yang adil. Begitupun dengan beberapa ulama salaf juga mempunyai keyakinan bahwa imam yang adil meskipun sesat lebih baik daripada ahli ibadah yang beribadah seribu tahun. Rasulullah Saw memberikan contoh yang benar dalam mengemban amanah sebagai seorang pemimpin, dimana hal tersebut seperti yang dikatakannya pada putri beliau yakni ketika dia mencuri akan dipotong tangannya, itu termasuk contoh sikap amanah dan adil dari beliau. Karena, pemimpin yang adil dan amanah termasuk tiang Negara, pemimpin yang adil juga merupakan penyebab rahmat dan ditambahnya keberkahan pada suatu negara.¹⁹

Novita juga menjelaskan bahwa kurang lebih terdapat 18 poin utama mengenai konsep NKRI bersyariah tersebut yang disampaikan oleh Habib Rizieq Syihab dalam pidatonya yang diunggah dalam sosial media *Youtube*, diantaranya sebagai berikut:

1. NKRI bersyariah adalah NKRI yang beragama –dalam artian tidak atheis maupun komunis yang tanpa agama-.
2. NKRI yang berketuhanan maha Esa.

¹⁹ *Ibid.*, 233.

3. NKRI yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur ketuhanan yang maha Esa.
4. NKRI yang patuh dan taat terhadap hukum Allah SWT.
5. NKRI yang berkemanusiaan yang adil dan beradab.
6. NKRI yang menjaga persatuan Indonesia.
7. NKRI yang mengedepankan musyawarah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan amanat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
8. NKRI yang menolak *neoliberalis-sosialis* dan *neoliberalis-kapitalis* dalam mewujudkan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
9. NKRI yang menjamin setiap umat beragama untuk menjalankan ibadah dan syariat agamanya masing-masing.
10. NKRI yang melindungi rakyat dari berbagai macam maksiat.
11. NKRI yang menghadirkan pejabat yang amanat.
12. NKRI yang melindungi umat Islam sebagai mayoritas rakyat Indonesia dari mengkonsumsi berbagai macam produk –makanan, minuman, obat-obatan, dan sebagainya- yang haram.
13. NKRI yang menghormati dan mencintai para ulama dan santri, serta tidak menganggapnya sebagai seorang kriminal ataupun teroris.
14. NKRI yang menjadikan pribumi sebagai tuan rumah –memulyakan- di negeri sendiri.
15. NKRI yang menghargai dan melindungi pesantren maupun madrasah.

16. NKRI yang anti korupsi, miras, narkoba, pornografi, prostitusi, *LGBT*, teroris, sparatis, fitnah, kebohongan, kemungkaran, dan kezaliman.
17. NKRI yang berdasarkan pada pancasila dan UUD 1945 asli sesuai dengan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan sesuai dengan dekrit presiden 5 Juli 1959.²⁰



²⁰ Novita Dinar Rahmawati, “Respons Muslim Tionghoa Surabaya Terhadap Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersyariah Front Pembela Islam” (Skripsi—Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2020), 47-50.

BAB IV

KONSEP INDONESIA BERSYARIAH DALAM ANALISIS DEKONSTRUKSI JACQUES DERRIDA

A Oposisi Biner dalam Konsep NKRI Bersyariah

Narasi merupakan suatu hubungan dari suatu konsep, dan narasi sendiri hadir baik berupa teks maupun ungkapan yang tentunya berkaitan erat dengan suatu bahasa. Teks tersebut pada dasarnya memiliki sebuah tujuan tertentu yang biasanya terdapat pada judul, dan pada setiap judul tersebut biasanya juga disisipkan suatu konsep yang menjadi inti dari teks –dalam istilah logosentrisme dan strukturalisme disebut dengan oposisi biner- tersebut yang pada akhirnya membuatnya istimewa sehingga dapat menampilkan suatu kebenaran yang objektif. Edmund Husserl menyebut kebenaran objektif tersebut dengan istilah *logical investigation* yang kemudian menjadi *living real*. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa tujuan maupun fungsi dari suatu pusat teks tersebut adalah agar terhindarnya dari aspek-aspek ambiguitas maupun permainan makna dalam suatu teks. Dekonstruksilah yang berperan dalam mengungkap pusat dari teks tersebut yang kemudian memunculkan logika biner yang mendukung suatu makna dari pusat teks.¹

Pada bagian ini penulis berusaha untuk mengungkap bagaimana suatu teks dapat menyusun suatu wacana dan membuat anggapan-

¹ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 216.

anggapan berdasarkan struktur yang telah dibangun di dalam teks tersebut. Lebih lanjut, penulis ingin mengungkap mengenai *system of opposition* yang terdapat dalam teks tersebut, dimana *system of opposition*² tersebut cenderung tidak diungkap atau disembunyikan oleh penulis teks tersebut. Hingga kemudian berusaha untuk mencari dan mengamati tatanan teks yang tidak disadari atau ekstualitas dibalik teks. Pada setiap teks pastinya senantiasa tersisipkan suatu sistem pertahanannya sendiri,³ dan sistem pertahanan tersebutlah yang nantinya membuat pembaca untuk tidak bersikap skeptis, sehingga munculah anggapan bahwa teks tersebut memuat suatu kebenaran objektif dari sistem tanda. Konsep Indonesia Bersyariah yang dilontarkan oleh Habib Rizieq memiliki visi-misi tersebut, dimana ia memberikan gambaran secara rasional dan tidak menimbulkan ambiguitas dalam konsep tersebut.

Pada beberapa poin-poin yang telah diutarakan oleh Habib Rizieq mengenai konsep NKRI Bersyariah, Habib Rizieq telah menyampaikan narasinya dengan sangat maksimal sehingga dapat menghindari berbagai macam hal yang dapat mengkritiknya. Konsep yang diutarakannya tersebut terlihat sudah sangat bersih dari kritik maupun ketidakjelasan. Habib Rizieq ingin menangkap berbagai macam permasalahan ke dalam suatu rumusan umum yang mampu mengatasinya, kemudian Habib Rizieq menggunakan kata “bersyariah”. Hal tersebut ditujukan untuk memberi pembelaan terhadap nilai-nilai Islam dari berbagai macam hal yang dapat

² Bambang Sugiarto, *Postmodernisme: Tantangan Bagi Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), 46.

³ Haryatmoko, *Critical Discourse*, 217.

merusak ataupun mengancamnya, seperti hal-hal yang terindikasi maksiat. Habib Rizieq menggunakan kata “bersyariah” tersebut agar dapat mengurangi beberapa persoalan yang sedang terjadi di Indonesia pada saat itu dengan menggunakan suatu permainan kata atau retorika. Hal tersebut tentunya akan menyinggung beberapa pihak, sebab dinilai akan mendirikan suatu negara Islam. Akan tetapi Habib Rizieq tidak menghiraukan hal tersebut dikarenakan latar belakang Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka Habib Rizieq beranggapan akan mendapat banyak dukungan atas konsepnya tersebut.

Pada dasarnya Habib Rizieq telah memberikan beberapa penjelasan mengenai konsep NKRI Bersyariah tersebut, namun penerapan oleh beberapa anggota FPI yang kurang sesuai dengan sosio-kultural yang terdapat dalam masyarakat, membuat masyarakat mempertanyakan mengenai konsep tersebut. Berbagai macam tanggapan akhirnya muncul terkait penerapan maupun tujuan yang melatarbelakangi dari konsep tersebut. Sebab terdapat beberapa insiden yang membuat ragu masyarakat mengenai penerapan dari konsep tersebut, dimana terdapat pemaksaan ataupun kekerasan dalam penerapannya, seperti pada saat menertibkan warung-warung yang masih berjualan pada saat bulan Ramadhan.⁴ Hal tersebut akhirnya membuat konsep dari narasi “bersyariah” dipertanyakan dan memang sudah seharusnya suatu konsep dari suatu narasi memerlukan

⁴ Khairunnisa Fauzatul A., <https://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-06378648/cek-fakta-benarkah-fpi-kembali-sweeping-rumah-makan-di-ciamis-saat-bulan-ramadhan-cek-faktanya>, diakses 13 November 2021 pukul 11.56. Lihat juga <https://news.detik.com/berita/d-1702591/buka-siang-saat-puasa-restoran-topaz-makassar-diserbu-fpi>, diakses 13 November 2021 pukul 11.56.

suatu kritik. Sesuai dengan pernyataan Derrida yang beranggapan bahwa dalam teks maupun narasi tidak terdapat kata final, karena pada segala macam bangunan teks maupun narasi pada dasarnya memiliki kontradiksi tersendiri yang disembunyikan yang tidak dapat diterima secara seratus persen.⁵

Penulis menemukan bahwa oposisi biner yang terdapat pada konsep yang telah diutarakan oleh Habib Rizieq tersebut adalah kata atau istilah “bersyariah” atau hukum Islam. Habib Rizieq menyatakan bahwa NKRI dalam menjalankan segala aktifitas pemerintahannya –baik menjadi dasar hukum atau semua peraturan undang-undang- harus berlandaskan syariah atau hukum Islam.⁶ Narasi yang diutarakan oleh Habib Rizieq tersebut ditujukan untuk menghapus kemaksiatan yang berada di Indonesia ini setelah melihat berbagai macam fenomena yang terjadi, seperti korupsi, prostitusi, miras, dan lain sebagainya dengan menggunakan hukum Islam atau syariah Islam. Oleh sebab itu, “syariah” dijadikan sebagai *superior* atau yang diutamakan, “syariah” dianggap sebagai suatu konsep yang asli dan kebenarannya lebih absolut. *Superioritas* dari “syariah” tersebut membuatnya menjadi suatu konsep tunggal dari narasi dari sebuah kebenaran dari narasinya. Habib Rizieq ingin menunjukkan suatu kebenaran objektif dengan memberikan penjelasan yang nampak rasional dan tidak menimbulkan ambiguitas yang terdapat pada sistem tanda “syariah”.

⁵ Muhammad al-Fayyad, *Derrida* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 25.

⁶ Syihab, *Wawasan Kebangsaan*, XI.

Pada oposisi biner sendiri termuat beberapa sistem tanda, yakni *signified* (petanda) dan *signifier* (penanda).⁷ Sedangkan *signifier* dari konsep tanda yang dilayangkan oleh Habib Rizieq adalah “syariah” yang berbicara mengenai hukum Islam. Sementara itu, *signified* dari konsep tersebut adalah suatu sistem maupun tata cara yang mengatur dan mengikat dalam melakukan berbagai macam hal sesuai dengan sumber hukum Islam, yakni al-Qur’an dan sunnah.

Tanda dalam oposisi biner tersebut tidak berdiri sendiri, dalam sistem tanda suatu tanda memiliki keterkaitan maupun suatu hubungan dengan tanda lainnya atau yang biasa disebut dengan *difference* (perbedaan). *Difference* tersebut bertujuan untuk memberi suatu penjelasan terhadap makna yang terdapat pada realitas yang ingin diungkap. Tanda lain yang berkaitan dengan konsep NKRI Bersyariah Habib Rizieq tersebut adalah “toleransi” yang berposisi sebagai *signifier*. Sedangkan *signified* dari tanda tersebut adalah suatu sikap atau tingkah laku menghormati maupun menghargai terhadap berbagai macam hal perbedaan, baik dalam lingkup sosial, politik maupun beragama. Pada saat Habib Rizieq menyampaikan pidatonya dengan menekankan betapa pentingnya penegakkan syariah Islam terhadap NKRI, secara tidak langsung hal tersebut membuat tanda (toleransi) tersebut menjadi suatu hal yang terpinggirkan atau *inferior* dalam narasi Habib Rizieq tersebut.

⁷ *Signifier* merupakan suatu bentuk materi seperti gambar ataupun bunyi, sedangkan *signified* adalah suatu konsep dari gambar atau bunyi tersebut. Lihat: Okke K. S. Zaimar, *Semiotik dan Penerapannya dalam Karya Sastra* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 8-9. Lihat juga: Fayyad, *Derrida*, 39.

Sesuai dengan pendapat sebelumnya bahwa dekonstruksi berfokus pada sesuatu yang *inferior* dalam oposisi biner. Seperti halnya contoh di atas, dimana “syariah” yang terdapat pada narasi Habib Rizieq menjadi suatu hal yang *superior*, sedangkan “toleransi” menjadi suatu hal yang *inferior* dalam narasi tersebut. Pada dasarnya peneliti tidak ingin membela atau mendukung sesuatu yang *inferior*, namun peneliti ingin menampakkan bahwa suatu hal yang *inferior* ataupun *superior* tersebut merupakan suatu proses yang tidak konsisten dengan dirinya sendiri, sebab pasti terdapat kontradiksi di dalamnya. Peneliti hanya ingin menunjukkan bahwasanya pemahaman terhadap narasi yang telah diutarakan oleh Habib Rizieq menggunakan dekonstruksi tidak memasukkan kekuatan dari luar dengan tujuan untuk mengacaukan narasi tersebut. Akan tetapi, kekuatan tersebut sudah terdapat dalam narasi yang secara tidak langsung akan mendekonstruksi dirinya sendiri, suatu hal yang bersifat *inferior* tersebut dalam oposisi biner tidaklah bersifat stabil, dan dekonstruksi meminati instabilitas tersebut.⁸

B Difference dalam Konsep NKRI Bersyariah

Dekonstruksi yang ditawarkan oleh Derrida pada dasarnya adalah suatu metode dalam membaca suatu teks, dalam dekonstruksi juga termuat hermeneutika –namun berbeda dengan Dilthey maupun Gadamer-. Konsep hermeneutika yang ditawarkan Derrida terkesan sangat radikal, sebab

⁸ F. Budi Hardiman, *Seni Memahami: Hermeneutika dari Schleiermacher Sampai Derrida* (Yogyakarta: Kanisius, 2015), 280.

menekankan permainan bebas terhadap suatu teks. Jadi, suatu teks bisa dimainkan atau dibaca dalam sudut pandang apapun, termasuk menemukan *blind spot* atau titik buta yang mengandung suatu retakan dalam suatu teks. Hingga pada akhirnya peneliti tidak mencari suatu kesimpulan atau merumuskan suatu konsep berpikir, serta tidak memberikan definisi terhadap sesuatu dan menjelaskan bahwa penafsiran terhadap suatu teks tersebut tidak memiliki batas akhir.⁹ Metode atau cara baca dekonstruksi tidak berdasarkan suatu pemikiran maupun konsep yang sudah ada sebelumnya, namun membiarkan hal-hal yang berhubungan dengannya –suatu hal lain- hadir berdampingan dengan konsep tersebut. Oleh sebab itu, disini peneliti tidak ingin mengacaukan narasi yang diutarakan oleh Habib Rizieq menggunakan suatu hal yang berada di luar narasi tersebut.

Differance kemudian digunakan untuk membongkar titik lemah maupun untuk melawan balik dari oposisi biner tersebut, sebab pada dasarnya setiap membuat sebuah argumentasi maupun asumsi akan selalu terdapat *differance*. Konsep kerja dari *differance* adalah secara terus menerus mempertanyakan perihal suatu asumsi yang dianggap stabil, yang kemudian diuji kembali dengan berbagai macam kemungkinan lain secara radikal, paradok dan absurd. Oleh sebab itu, *differance* berperan untuk menghidupkan kembali permainan logika terkait logika dari oposisi biner, sehingga kebenaran, makna ataupun referensi yang terdapat dalam teks

⁹ Joko Siswanto, “Metafisika Derrida”, *Jurnal Filsafat*, Vol. 31, No. 01 (2021), 9.

tidak menjadi tujuan utama untuk dicari.¹⁰ Cara membaca dekonstruksi sendiri terhadap suatu teks adalah dengan cara menunda dan mencari hal lain, serta menunda hubungan antara *signifier* dan *signified*. Hal tersebut sudah sesuai dengan pernyataan Derrida sendiri, bahwa proses *différance* merupakan suatu penolakan terhadap makna dan suatu petanda yang dianggap final atau tidak bisa diganggu gugat yang menjadi pokok dari konsep yang dinyatakan oleh Habib Rizieq.

Pada penelitian ini, penulis ingin menunjukkan titik hitam atau kecacatan yang dianggap suatu penyelesaian masalah yang paling benar oleh Habib Rizieq dalam narasinya mengenai “NKRI Bersyariah”. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, bahwa dekonstruksi terdapat pada oposisi biner atau yang dianggap sebagai *superior*, dan antara *superior* dengan *inferior* tersebut sudah pernah terjadi sebelumnya dalam suatu proses sejarah dan sejarah tersebut yang juga menampilkan suatu ketidaksetabilan dari dua aspek tersebut. Pada narasi Habib Rizieq tersebut yang dianggap *superior* adalah konsep “syariah” dan konsep tersebut tentunya tidak dapat berdiri sendiri sebab berkaitan dengan aspek-aspek lainnya, seperti agama, pendidikan, sosio-kultural, sosio-politik, dan lain sebagainya. Sejarah sendiri juga telah memperlihatkan bahwa konsep tanda syariah sendiri tidak stabil dan senantiasa memiliki ancaman untuk tereduksi oleh aspek lain yang memiliki keterikatan padanya, seperti halnya dengan aspek toleransi.

¹⁰ Eko Ariwidodo, “Logosentrisme Jacques Derrida dalam Filsafat Bahasa”, *Karsa*, Vol. 21, No. 02 (2013), 349.

Setelah menetapkan oposisi biner dalam narasi Habib Rizieq tersebut, langkah selanjutnya yang diambil oleh peneliti adalah membalik biner dalam narasi tersebut dengan cara menukar posisi dari yang sebelumnya *inferior* (toleransi) menjadi *superior* atau yang utama. Langkah ini pada dasarnya memiliki tujuan untuk memperlihatkan bahwa oposisi biner sebelumnya telah meninggalkan sebuah pemahaman lain. Penggunaan *difference* terdiri atas keterkaitan tanda *signifier* dengan *signifier* yang lain. Pada konteks ini, keterkaitan tanda “syariah” yang menjadi oposisi biner dengan “toleransi” yang terindikasi akan mengancam dari oposisi biner tersebut. Pada tanda “toleransi” tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang tidak bisa menerapkan konsep syariah tersebut, sebab dalam penerapan dari toleransi tersebut terdapat beberapa aspek kebebasan. Sementara itu, pada tanda “syariah” sendiri terdapat suatu petanda yang mana dalam penerapan syariah Islam sendiri sangat mengikat dan seakan mengekang dan terikat. Melihat hal tersebut, *difference* memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan antara keterikatan (syariah) dan kebebasan (toleransi), dan juga sekaligus menunda makna dari keterikatan dengan kebebasan. Hal tersebut membuat tanda keterikatan terancam oleh tanda kebebasan, dan ketika kebebasan dibalik menjadi yang *superior*, maka secara tidak langsung akan mendekonstruksi narasi yang diutarakan oleh Habib Rizieq mengenai konsep syariah dan juga menunjukkan bahwa narasinya tersebut tidak stabil dan absolut.

Habib Rizieq secara tidak sadar telah membalik sendiri biner yang terdapat pada narasinya dengan menempatkan tanda *inferior* (toleransi) menjadi tanda *superior*, serta menghilangkan tanda (syariah) yang sebelumnya menjadi *superior* pada narasinya tersebut. Habib Rizieq dalam narasinya bahwa pada konsep NKRI Bersyariah tersebut bertujuan untuk menjaga persatuan Indonesia dan melindungi rakyat dari berbagai macam maksiat dengan patuh terhadap hukum Allah SWT, serta menjamin setiap umat beragama untuk menjalankan aktifitas ibadahnya masing-masing.¹¹ Dalam kebijakan tersebut Habib Rizieq mendekonstruksi narasinya sendiri, Habib Rizieq, dengan menciderai hal yang mengikat atau ketat dengan suatu hal yang terindikasi kebebasan.

Melindungi masyarakat dari maksiat –miras, obat terlarang, sparatis, prostitusi, dan lain sebagainya- dengan cara patuh terhadap hukum Allah SWT sendiri bersifat mengikat, dimana setiap lapisan masyarakat –tidak terkecuali penganut agama lain- diharuskan untuk mentaati setiap aturan yang sudah ditetapkan oleh syariah Islam. Meski perihal aktifitas keagamaan atau peribadatan disesuaikan dengan agamanya masing-masing, namun berbagai macam aktifitas yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tentunya juga akan dilarang nantinya, seperti makan daging babi, minum-minuman keras, melakukan riba (bank), dan lain-lain. Sedangkan bagi umat selain Islam hal tersebut merupakan suatu hal yang lumrah dan tidak dilarang, maka secara tidak langsung hal

¹¹ Novita Dinar Rahmawati, “Respons Muslim Tionghoa Surabaya Terhadap Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersyariah Front Pembela Islam” (Skripsi—Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2020), 47-50.

tersebut mendekonstruksi nilai-nilai syariah yang mengharuskan mentaati berbagai macam aturan Islam terkait makanan, minuman, serta muamalah. Hal tersebut menandakan suatu kontradiksi dalam logika yang disampaikan dalam narasi Habib Rizieq, sebab tidak mungkin syariah Islam tersebut diterapkan pada semua lapisan masyarakat tanpa penyesuaian terlebih dahulu yang nantinya akan berpotensi untuk mendiskriminasi suatu kelompok dari agama lain.

Terdapat instabilitas lain dari narasi yang telah diutarakan oleh Habib Rizieq, yakni NKRI haruslah menjunjung tinggi keadilan dan adab, namun disisi lain Habib Rizieq juga menyatakan bahwa NKRI harus menghargai dan melindungi pesantren maupun madrasah, menghormati para ulama dan santri, serta tidak menganggapnya sebagai seorang teroris maupun criminal. Melihat dari pernyataan tersebut terlihat jelas instabilitas yang terdapat padanya. Jika memang Habib Rizieq mengharuskan untuk bersikap adil, maka yang harus dihormati dan dilindungi tidak hanya para ulama, santri, pesantren maupun madrasah. Para tokoh pemuka agama, tempat ibadah, tempat pendidikan maupun masyarakat yang menganut agama selain Islam juga harus dihormati, dicintai dan dilindungi. Oleh sebab itu, secara tidak langsung Habib Rizieq sudah mendekonstruksi narasinya sendiri mengenai NKRI Bersyariah dengan tanpa sadar telah menunjukkan beberapa instabilitas pada oposisi biner yang terdapat dalam narasinya tersebut.

C Diseminasi

Diseminasi merupakan suatu proses yang terdapat dalam dekonstruksi Derrida, dan proses penyebaran tersebut nantinya berhubungan atau berkaitan dengan *differance*. Strategi yang digunakan dalam diseminasi adalah dengan cara memanfaatkan suatu teks sebagai arena atau tempat permainan yang secara terus menerus ditransformasikan dengan cara mensubstitusi atau mengganti penanda lama dengan suatu penanda yang baru. Hal tersebut nantinya berfungsi untuk menunda kesimpulan dari suatu petanda yang terdapat pada suatu teks nantinya, juga membuat sistem yang terdapat dalam teks tersebut menjadi berantakan. Sisa dari sistem teks yang berantakan tadi kemudian disusun kembali dan diruntuhkan kembali hingga tanpa akhir, sebab Derrida tidak menginginkan suatu akhir atau kesimpulan dari teks tersebut, agar teks atau narasi tersebut senantiasa berkembang.¹²

Langkah pertama yang dilakukan untuk menunjukkan diseminasi pada narasi NKRI Bersyariah yang dilontarkan Habib Rizieq adalah dengan mengamati kunci dan pokok logika dari narasi tersebut. Kemudian, peneliti berhasil mengamati kunci maupun logika yang terdapat dalam narasi Habib Rizieq tersebut, yakni syariah atau hukum Islam. Syariah tersebut nantinya akan dipresentasikan sebagai suatu hal yang mengikat maupun mengekang dalam beberapa aspek, seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lain sebagainya. Interpretasi lainnya terdapat pada

¹² Fayyad, *Derrida*, 79.

“toleransi” yang nantinya dipresentasikan sebagai suatu bentuk kebebasan dalam melakukan beberapa hal, seperti menjalankan proses beragama, berekspresi, berpikir serta mengutarakan pendapat dan kebebasan perihalnya¹³.

Langkah selanjutnya peneliti juga melakukan pengamatan pada narasi tersebut yang hasilnya adalah terdapat konflik pada narasi tersebut, dimana antara makna dari kekangan dengan makna kebebasan, dan kekangan tersebut terancam oleh kebebasan.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Habib Rizieq sendiri yang menyatakan bahwa Indonesia harus mempertahankan berbagai macam ciri khasnya dan tidak harus menjadi suatu negara yang mirip seperti Arab Saudi. Penerapan syariah Islam secara kaffah tersebut pada dasarnya ditujukan untuk seluruh umat muslim yang berada dalam naungan NKRI. Hal tersebut disebabkan karena mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, oleh sebab itu sudah wajar jika penerapan NKRI Bersyariah dilaksanakan di Indonesia.¹⁴ Beberapa tahun terakhir Indonesia memang sedang dilanda dilema perihal identitas dan karakter dari Indonesia sendiri, sebab terdapat beberapa kelompok yang sangat ingin membuat Indonesia menjadi seperti Arab Saudi –baik dalam aspek sosial, politik maupun budaya-.

¹³ Kebebasan rasa adalah suatu kebebasan dalam melakukan berbagai macam kegiatan yang disukai selama bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut, dan kegiatan tersebut tidak merugikan serta mengganggu kebebasan orang lain. Lihat: Arlisa Siti Zahra, “Analisis Meningkatnya Fenomena Islamophobia di Perancis Pada Era Pemerintah Francois Hollande Tahun 2015-2016” (Skripsi—Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020), 37.

¹⁴ Syihab, *Wawasan Kebangsaan*, 234.

Langkah ketiga yang diambil peneliti adalah dengan cara menunjukkan bahwa dalam konflik yang terdapat pada narasi tersebut telah menghasilkan interpretasi lain yang berpotensi menghasilkan konflik lain nantinya. Hasil pengamatan dari peneliti bahwasannya kebijakan yang diwacanakan dalam narasi NKRI Bersyariah tersebut adalah menjamin kebebasan dalam menjalankan agama masing-masing, serta melindungi rakyat dari berbagai macam maksiat nantinya akan menimbulkan konflik baru. Beberapa konflik yang kemungkinan terjadi nantinya seperti intoleransi perihal pelaksanaan dari kebijakan tersebut, sebagai contoh mengenai beberapa kegiatan penertiban yang dilakukan oleh anggota FPI dalam menertibkan warung yang masih buka pada saat bulan Ramadhan.¹⁵ Oleh sebab itu, narasi yang dilayangkan oleh Habib Rizieq tersebut menimbulkan interpretasi lain, yakni makna intoleransi.

Langkah terakhir adalah dengan cara mengakomodir ketiga langkah sebelumnya agar bisa membuat pernyataan bahwasanya suatu teks tidak dapat dirumuskan dalam satu pengertian tunggal. Narasi mengenai NKRI Bersyariah tersebut pada dasarnya tidak bisa diartikan sebagai suatu pengertian yang tunggal, yakni suatu kekangan. Sebab suatu kekangan tersebut selalu memiliki aspek lain, yakni kebebasan atau toleransi. Jika Habib Rizieq tetap mempertahankan syariah atau kekangan sebagai pusat dari narasinya terhadap fenomena yang sedang terjadi di Indonesia, maka akan

¹⁵ Khairunnisa Fauzatul A., <https://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-06378648/cek-fakta-benarkah-fpi-kembali-sweeping-rumah-makan-di-ciamis-saat-bulan-ramadhan-cek-faktanya>, diakses 13 November 2021 pukul 11.56. Lihat juga <https://news.detik.com/berita/d-1702591/buka-siang-saat-puasa-restoran-topaz-makassar-diserbu-fpi>, diakses 13 November 2021 pukul 11.56.

berkelanjutan menemui ketidakstabilan dalam logikanya. Latar belakang dari narasi NKRI Bersyariah tersebut didasarkan pada semakin maraknya maksiat yang terdapat di Indonesia, terutama perihal pemerintahan yang dinilai tidak adil dan tidak amanah.

Berdasarkan pada analisis sebelumnya dengan konsep dekonstruksi, peneliti menganggap bahwa narasi yang dilayangkan oleh Habib Rizieq tersebut dalam menanggapi berbagai macam isu dan permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia ini masih kurang tepat. Habib Rizieq menganggap bahwa dengan syariah bisa menyelesaikan berbagai masalah tersebut terutama yang berkaitan dengan sistem pemerintahan atau dalam dunia politik, sebab karena penerapan syariah Islam secara ketat bisa menghapus berbagai macam maksiat yang terdapat di dalamnya. Penerapan syariah atau hukum Islam secara ketat dan memaksa tersebut tentunya tidak akan mengatasi masalah yang sedang dialami secara baik dan maksimal, sebab pada dasarnya negara Indonesia memang memiliki keanekaragaman baik dalam aspek agama, suku maupun budayanya. Jadi, implementasi dari syariah Islam tersebut jika terlalu keras dan ketat nantinya tidak akan berdampak baik, sebab tidak semua pihak bisa sesuai dengan syariah Islam tersebut tanpa adanya penyesuaian terlebih dahulu, serta keadilan dalam penerapannya juga akan dipertanyakan nantinya. Sesuai dengan pernyataan Habib Rizieq dalam narasinya yang mengalami ketidakstabilan dalam logika, ketika pada satu poin Habib Rizieq menyatakan untuk menjunjung tinggi keadilan dan akan

melindungi kelompok di luar Islam, namun pada poin lainnya Habib Rizieq lebih berpihak pada golongannya sendiri –masyarakat muslim-.¹⁶

Setelah melakukan dekonstruksi pada biner yang terdapat pada konsep NKRI Bersyariah tersebut, peneliti berpendapat bahwa masih terdapat berbagai macam cara lain untuk mengatasi persoalan yang sedang melanda di Indonesia tersebut, sehingga nantinya akan meminimalisir munculnya suatu konflik baru yang memiliki kemungkinan terjadi dan tidak mengakibatkan timbulnya kerancuan dalam logika. *Pertama*, tidak semata-mata mengaitkan berbagai macam hal dari sudut pandang agama, diperlukan adanya suatu analisis terkait suatu aspek tertentu dengan menggunakan alat analisis yang sesuai –seperti permasalahan politik juga harus dianalisis menggunakan ilmu politik, begitupun yang lainnya-. *Kedua*, tindakan atau penerapan hukum atau syariah Islam yang akan dilakukan nantinya harus disesuaikan dengan kondisi objek, baik meliputi aspek agama, politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya, agar tidak terjadi suatu salah paham untuk kedepannya. *Ketiga*, sikap empati harus lebih ditekankan terhadap penyesuaian kebijakan tersebut, agar tidak ada yang tersinggung pada saat penerapan konsep tersebut.

¹⁶ Rahmawati, *Respon Muslim*, 47-50.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang bisa menjawab problematika yang telah dikaitkan dalam rumusan masalah sebelumnya. Kesimpulan pertama berkaitan erat dengan narasi NKRI Bersyariah yang dilayangkan oleh Habib Rizieq, dimana narasi tersebut dilatar belakangi atas fenomena maksiat yang sedang melanda Indonesia, salah satunya pemerintah yang tidak jujur dan adil. Isi dari narasi NKRI Bersyariah tersebut diantaranya adalah menerapkan NKRI yang beragama –tidak atheis maupun komunis yang tanpa agama-, berketuhanan maha Esa, menjunjung tinggi keadilan dan taat terhadap hukum Allah SWT, menjaga persatuan dan mengedepankan musyawarah, menjamin setiap umat beragama dalam menjalankan ibadahnya dan melindungi rakyat dari berbagai macam maksiat, menghadirkan pejabat yang amanah, menghormati dan mencintai para ulama dan santri beserta tempat pendidikannya, serta NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 asli sesuai dengan Piagam Jakarta maupun dekrit presiden 5 Juli 1959.

Narasi NKRI Bersyariah tersebut kemudian didekonstruksi sesuai dengan konsep dekonstruksi dari Derrida. Pada konsep tersebut sendiri

terdapat biner –syariah- yang dianggap sebagai *superior*, dan oposisinya – toleransi- yang dianggap sebagai *inferior*. Setelah dilakukan proses *defferance* dan *dissemination* ternyata masih terdapat beberapa instabilitas paa narasi yang dilayangkan Habib Rizieq tersebut. Beberapa kebijakan yang diutarakan Habib Rizieq tersebut berpotensi untuk menimbulkan konflik baru di tengah konflik atau permasalahan yang sedang terjadi, yakni perihal toleransi antara umat beragama, baik dalam faktor sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Perlu pemahaman dan observasi yang lebih mendalam mengenai beberapa aspek tersebut, sebelum diterapkannya konsep NKRI Bersyariah tersebut.

B Saran

Berdasarkan penelitian mengenai “Kritik Konsep NKRI Bersyariah Habib Rizieq Perspektif Teori Dekonstruksi Hermeneutika Jacques Derrida”, maka peneliti ingin memberikan beberapa saran terkait dengan penelitian tersebut, diantaranya:

1. Bagi masyarakat, pemahaman terkait hermeneutika Derrida ini dapat mengembangkan kemampuan dalam membaca suatu teks secara lebih kritis, serta memberikan pemahaman bahwasannya dalam suatu teks tersebut memiliki makna atau kebenaran yang sifatnya tidak absolut atau tetap, dan masih terdapat berbagai macam kemungkinan makna atau kebenaran yang terdapat dalam teks tersebut.

2. Bagi penulis, konsep yang diutarakan oleh Habib Rizieq tersebut belum tentu merupakan solusi yang paling tepat dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan yang sedang melanda di Indonesia, mungkin terdapat beberapa kebijakan yang sesuai, namun tidak mustahil juga terdapat beberapa kebijakan lain yang masih memerlukan tinjauan ulang dalam penerapannya.
3. Adanya penulisan skripsi ini bertujuan untuk bisa menghadirkan pengetahuan secara lebih luas dan mendalam, baik melalui generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, agar generasi yang selanjutnya tersebut tidak menjadi generasi yang lupa akan suatu sejarah yang telah terjadi.
4. Pengambilan tema dan isu tersebut diharapkan menjadi suatu motivasi dan dorongan dalam meneliti lebih lanjut mengenai berbagai macam konsep atau narasi yang telah diutarakan oleh berbagai macam tokoh yang memiliki pengaruh dalam beberapa hal, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang bisa berakibat pada keutuhan dan persatuan antar umat beragama maupun bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Fayyad, Muhammad. *Derrida*. Yogyakarta: LKiS. 2005.

Hardiman, F. Budi. *Seni Memahami: Hermeneutika dari Schleiermacher Sampai Derrida*. Yogyakarta: Kanisius. 2015.

Haryatmoko. *Critical Discourse Analisis*. Jakarta: Rajawali Press. 2017.

Lubis, Akhyar. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Rajawali Press. 2014.

Mujiburrahman. *Agama Generasi Elektronik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press: Banjarmasin. 2011.

Sugiarto, Bambang. *Postmodernisme: Tantangan Bagi Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius. 1996.

Syihab, Habib Rizieq. *Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah*. Jakarta: Suara Islam Press. 2012.

Zaimar, Okke K. S. *Semiotik dan Penerapannya dalam Karya Sastra*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008.

Jurnal

Ariwidodo, Eko. "Logosentrisme Jacques Derrida dalam Filsafat Bahasa". *Jurnal Karsa*. Vol. 21. No. 02. 2013.

Hakim, Latifa Dinar Rahmani. "Grebeb Sudiro dan Representasi Keberagaman di Sudiroprajan Kota Surakarta". *Lasigo*. Vol. 02. No. 01. 2020.

Hastangka, H, dkk. "Empat Pilar MPR RI: Politik Bahasa Dan Delegitimasi Makna Pancasila (Suatu Telaah Filsafat Bahasa)". *CIVIS*. Vol. 06. No. 2. 2017.

Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani dan Syaiful Bahri. "NKRI Bersyariah: Praktik Spasial, Representasi Ruang, Ruang Presentasional". *Al-Daulah*. Vol. 10. No. 02. 2020.

Ngafifi, Muhammad. "Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Sudaya". *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*. Vol. 02, No. 01. 2014.

Perdiana, Kadek dan Gede Deva Maruta Ambara. "Potret Harmonis Masyarakat Multikultur di Desa Panji Anom". *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*. Vol. 01. No. 01. 2015.

Rahman, Fathor. "Potret Sosial Keberagamaan yang Harmonis di Puja Mandala, Nusa Dua Bali". *Al-Izzah*. Vol. 14. No. 01. 2019.

Sawir, Muhammad. "Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara". *JIAP: Journal of Administration Science and Governmental Science*. Vol 01. No. 01. 2016.

Siregar, Mangihut. "Kritik Terhadap Teori Dekonstruksi Derrida". *Journal of Urban Sociology*. Vol. 02. No. 01. 2019.

Siswanto, Joko. "Metafisika Derrida". *Jurnal Filsafat*. Vol. 31. No. 01. 2021.

Syihab, Habib Rizieq Syihab. *Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah*. Jakarta: Suara Islam Press. 2012.

Udang, Frety Cassia. "Berhermeneutik Bersama Derrida". *Tumou Tou*. Vol. 06. No. 02. 2019.

Ungkang, Marcelus. "Dekonstruksi Derrida Sebagai Strategi Pembacaan Teks Sastra". *Jurnal Pendidikan Humaniora*. Vol. 01. No. 02. 2013.

Skripsi

Margareth, Yuwita. "Dekonstruksi Derrida Terhadap Oposisi Biner dan Munculnya Pluralitas Makna". Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia. 2012.

Naser, Farid. "Kritik Ideologi Terhadap Gerakan Radikalisme Front Pembela Islam". Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019.

Putra, Abel Herdi Deswan. “Relasi Islam Dan Pancasila Dalam Pemikiran Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Syihab”. Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. 2017.

Quraishyah, Farwah. “Pemikiran Dakwah Habib Muhammad Rizieq Husein Syihab, MA”. Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah. 2014.

Rahmawati, Novita Dinar “Respons Muslim Tionghoa Surabaya Terhadap Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersyariah Front Pembela Islam”. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel. 2020.

Syihab, Habib Rizieq. “Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia”. Disertasi tidak diterbitkan. Kuala Lumpur: Universitas Malaya. 2012.

Zahra, Arlisa Siti Zahra. “Analisis Meningkatnya Fenomena Islamophobia di Perancis Pada Era Pemerintah Francois Hollande Tahun 2015-2016”. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2020.

Internet

A, Khairunnisa Fauzatul. <https://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-06378648/cek-fakta-benarkah-fpi-kembali-sweeping-rumah-makan-di-ciamis-saat-bulan-ramadhan-cek-faktanya>. Diakses 13 November 2021.

<https://news.detik.com/berita/d-1702591/buka-siang-saat-puasa-restoran-topaz-makassar-diserbu-fpi>. Diakses 13 November 2021

<https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/dynamism>. Diakses pada 20 November 2021.

<https://www.encyclopedia.com/philosophy-and-religion/other-religious-beliefs-and-general-terms/religion-general/animism>. Diakses pada 20 November 2021.

Kemdibud. <http://ditsmp.kemdikbud.go.id/indahnya-keberagaman-dan-pentingnya-toleransi-di-Indonesia/>. Diakses pada 29 Juni 2021.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A